



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 02.02/MENKES/66/2015

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di provinsi dan kabupaten/kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang . . .



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan . . .



- 3 -

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Alokasi dana dekonsentrasi di provinsi ditujukan untuk:

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan;
- b. program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- c. program pembinaan upaya kesehatan;
- d. program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. program kefarmasian dan alat kesehatan.

KEDUA : Alokasi dana tugas pembantuan di provinsi/kabupaten/kota ditujukan untuk:

- a. program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan
- c. program pembinaan upaya kesehatan.g

KETIGA . . .



- 4 -

- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rincian alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua untuk setiap satuan kerja tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas kesehatan provinsi.
- KEENAM : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dialokasikan dalam DIPA SKPD dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
- KETUJUH : Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
- KEDELAPAN : Petunjuk teknis program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan (fisik) dan realisasi anggaran bulanan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir bulan, laporan triwulan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir triwulan, dan laporan tahunan sebagai akhir pelaksanaan kegiatan (fisik) anggaran Tahun 2015 pada minggu I Februari 2016.

KESEPULUH . . .



- 5 -

KESEPULUH : Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan atas realisasi anggaran dan pengelolaan barang milik negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di daerah (dekonsentrasi/tugas pembantuan), diatur sebagai berikut :

- a. Gubernur/Bupati/Walikota wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi tingkat wilayah provinsi/kabupaten/kota yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/ B-W).
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membentuk unit akuntansi instansi tingkat satuan kerja yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) untuk masing-masing DIPA Program, bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan.

KESEBELAS : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), sebagaimana dimaksud Diktum Kesepuluh bertugas :

- a. menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan masing-masing DIPA Program di provinsi/kabupaten/ kota menjadi laporan keuangan tingkat wilayah.
- b. menyampaikan laporan keuangan tingkat wilayah kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai ketentuan.

KEDUABELAS : Laporan yang disampaikan oleh SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

KETIGABELAS . . .



- 6 -

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Menkes/SK/II/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

RUANG LINGKUP KEGIATAN
MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

**I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Rp. 259.806.300.000,-
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp259.806.300.000,-. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan TA 2015

Dana Dekonsentrasi ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain:

**1. KEGIATAN : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN**

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Mengikuti Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Pra Rakerkesnas).
- b. Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas).
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop).
- d. Mengikuti Pertemuan Penyusunan RKA Dekonsentrasi-01 Satker Biro Perencanaan dan Anggaran.



- 8 -

- e. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.
- f. Mengikuti Sosialisasi Juknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Penyusunan RKA DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016.
- g. Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kesehatan.
- h. Mengikuti Pertemuan Penelitian/Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran.
- i. Sosialisasi e-Renggar di Provinsi.
- j. Pertemuan Pra Rakontek Perencanaan di Provinsi.
- k. Mengikuti Rakontek Perencanaan.
- l. Mengikuti Penyusunan RKA-KL TA 2016.
- m. Mengikuti Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Pusat.
- n. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Provinsi.
- o. PertemuanPra Rakontek DAK TA 2016 di Provinsi.

2. KEGIATAN : PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Honorarium percepatan pengelolaan administrasi (SIMPEG) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus di provinsi dan kabupaten/kota(menu wajib).
- b. Pendataan tenaga PTT dan Penugasan Khusus di kabupaten/kota (penempatan tugas) (menu wajib).
- c. Monev/*Review*/pembinaan dinas provinsi ke kabupaten/kota terkait pengelolaan tenaga PTT dan Penugasan Khusus (menu wajib).
- d. Konsultasi dinas provinsi ke pusat terkait PTT dan Penugasan Khusus (wajib).
- e. Pengadaan ATK, fotokopi dan biaya pengiriman berkas PTT dan Penugasan Khusus (wajib).
- f. Rapat koordinasi pengelola kepegawaian PTT dan Penugasan Khusus dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebutuhan di daerah (menu pilihan).



- 9 -

- g. Apabila seluruh menu wajib telah cukup dialokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) dari kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian.

3. KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-wilayah Dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi untuk seluruh Program Kemenkes dalam penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, CaLK) Unit Akuntansi yg bersangkutan.
- c. Pertemuan Pengelolaan Keuangan dan BMN Semester dan Tahunan.
- d. Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan SAK dan SIMAK-BMN.
- e. Kegiatan Tindak Lanjut dan Rekonsiliasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal.

4. KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

- a. Honorarium pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) provinsi dan kabupaten/kota (menu wajib).
- b. Pemutakhiran dan analisis Data Tingkat Provinsi (menu wajib).
- c. Pengumpulan dan Penyediaan data profil (menu pilihan).
- d. Pertemuan berkala triwulan (Profil, Komdat, PMKDR, Sikda) dengan pengelola program Dinkes dan RS (menu pilihan).
- e. Diklat (profil, SIKNAS *online*, Komdat, WEB, database, GIS, survei cepat, jaringan, PMKDR) (menu pilihan).



- 10 -

- f. Penguatan pemanfaatan sarana pendukung SIK untuk Provinsi.

5. KEGIATAN : PENINGKATAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

RUANG LINGKUP KEGIATAN:

Pengadaan pakaian seragam Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) kloter di 13 (tiga belas) embarkasi haji, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

6. KEGIATAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

a. Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan

Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah kebijakan yang dibuat oleh provinsi baik oleh Dinas Kesehatan maupun sektoral berupa Peraturan daerah, peraturan/surat edaran/SK (gubernur, bupati dan walikota) yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

b. Kelompok Kerja Operasional UKBM atau Forum Peduli Kesehatan

Kelompok kerja operasional atau forum peduli kesehatan adalah kelompok kerja operasional atau forum peduli kesehatan yang aktif dan memiliki rencana kegiatan, dan dokumentasi kegiatan di level provinsi dan kabupaten/kota.

c. Model Intervensi Promosi Kesehatan

Model intervensi promosi kesehatan adalah model Promosi Kesehatan yang dikembangkan oleh daerah model intervensi spesifik lokal promosi kesehatan model intervensi yang dikembangkan oleh daerah berdasarkan lokal spesifik, replikasi model yang dilakukan daerah lain, implementasi konsep model intervensi yang dikembangkan pusat.



- 11 -

- d. Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/Swasta/INGO dan Pihak Lain) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan

Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/Swasta/INGO dan Pihak Lain) yang mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah mitra yang mendukung pembangunan kesehatan adalah jumlah kerja sama yang dilakukan Dinas Kesehatan provinsi dan kab/kota dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta dan pihak lain di lingkup kerjanya provinsi.

- e. Tema Kesehatan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat adalah tema pesan kesehatan pusat yang dikembangkan oleh daerah (spesifik lokal) maupun pengembangan tema pesan yang disusun oleh pusat

- f. Dokumen Perencanaan Program Dan Anggaran

7. KEGIATAN : PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 serta Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 dengan telah diimplementasikannya JKN oleh BPJS Kesehatan, maka lingkup kegiatan difokuskan untuk **mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan pengembangan pembiayaan kesehatan.**

Dana dekonsentrasi untuk kegiatan pembinaan, pengembangan pembiayaan dan pemeliharaan jaminan kesehatan terdiri dari:

a. WAJIB

1. Operasional Tim Monev JKN Prov/Kab/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan JKN di Prov/Kab/Kota
3. Diseminasi/Sosialisasi JKN dan Pembiayaan Kesehatan bagi Stakeholder
4. Bimbingan Teknis dan Monev Tim JKN Prov/Kab/Kota
5. Konsultasi Teknis Program pelaksanaan JKN dan Pembiayaan Kesehatan
6. Evaluasi Pelaksanaan JKN



- 12 -

7. Pengelolaan Keuangan DIPA
8. Pengelolaan Data Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

b. KEGIATAN PILIHAN

1. Pelatihan District Health Account (DHA)
2. Pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyusunan DHA
3. Pengelolaan Data PHA/DHA

8. KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN URUSAN TATA USAHA, KEPROTOKOLAN, RUMAH TANGGA, KEUANGAN DAN GAJI

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi melalui program dukungan dan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan yang diantaranya untuk percepatan pembayaran gaji dan insentif PTT melalui Pengelolaan urusan tata usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji (2037) dengan output Laporan Kegiatan dan Pembinaan (2037.002). Adapun menu dekonsentrasi untuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Pengelola PTT Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penggandaan dan Pengiriman Berkas
- c. Pengadaan ATK
- d. Rapat Koordinasi
- e. Menu pilihan :

Apabila seluruh menu wajib telah dialokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) dari kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji

9. KEGIATAN : PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

1. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan (dengan komponen : Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan)



- 13 -

2. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan (dengan komponen : Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota)

II. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Rp. 2.029.205.693.000 ,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di daerah tahun 2015 dalam upaya percepatan pencapaian indikator MDGs disediakan dana sebesar Rp. 2.029.205.693.000,- yang terdiri dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 648.737.922.000,- dan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 1.380.467.771.000,-

Dana Dekonsentrasi utamanya diarahkan untuk:

1. Melanjutkan kegiatan prioritas 2014 melalui berbagai terobosan dan akselerasi kegiatan 2015.
2. Meningkatkan kemitraan dan sinergisme pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.
3. Menurunkan angka kematian ibu, angka kematian neonatus, bayi dan anak balita.
4. Menangani masalah gizi kurang dan gizi buruk.
5. Menanggulangi dan memperbaiki gizi.
6. Meningkatkan pendidikan gizi;
7. Meningkatkan upaya kesehatan kerja dan olah raga.
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
9. Memberikan dukungan manajemen program Bina Gizi dan KIA untuk pengelolaan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi ; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang termasuk penyusunan laporan keuangan.



- 14 -

Dana tersebut disediakan untuk :

1. Pembinaan gizi masyarakat, dengan kegiatan utama:
 - a. Peningkatan kapasitas petugas seperti: penilaian pertumbuhan balita, konseling menyusui, konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), tata laksana anak gizi buruk, dan pemantauan status gizi.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pembinaan gizi terpadu.
 - c. Pelaksanaan kampanye gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.
 - d. Pelaksanaan surveilans gizi dan Pemantauan Status Gizi (PSG).
 - e. Pengadaan buku dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait pembinaan gizi.
 - f. Pengadaan dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI).
 - g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama lintas program (LP)/lintas sektor (LS) terkait perbaikan gizi masyarakat.
 - h. Pelaksanaan manajemen distribusi sarana dan prasarana kegiatan pembinaan gizi.
 - i. Pembinaan teknis, supervisi, monitoring, dan pendampingan.
 - j. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu, dengan kegiatan utama:
 - a. Peningkatan kemampuan teknis petugas kesehatan dan pengelola program dalam pelayanan kesehatan ibu, KB dan reproduksi (pelayanan antenatal terpadu, pelayanan persalinan, KB pasca persalinan, penanganan komplikasi maternal).
 - b. Peningkatan kemampuan manajemen petugas kesehatan dan pengelola program dalam pembinaan kesehatan ibu, KB dan reproduksi (supervisi fasilitatif, Audit Maternal Perinatal, surveillance kematian ibu kesehatan reproduksi darurat, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu).



- 15 -

- c. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ibu, KB dan reproduksi dengan penguatan kelas ibu hamil, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
 - d. Penyediaan buku pedoman, petunjuk teknis, modul, materi KIE untuk pelayanan antenatal, persalinan, nifas, penanganan komplikasi maternal, KB dan kesehatan reproduksi.
 - e. Pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis; surveilans kematian ibu, *review* dan evaluasi program.
 - f. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan koordinasi/kerja sama Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS), Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Pemerintah Daerah dan semua Mitra Terkait.
 - g. Penetapan sasaran, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pengolahan data dan analisis dalam intervensi program.
3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak, dengan kegiatan utama:
- a. Peningkatan kapasitas pengelola program dan tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial, tata laksana Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Stimulasi Deteksi Intervensi dan Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), kelas ibu balita, pelayanan kesehatan anak di Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), penjangkaran kesehatan siswa, penanganan Kekerasan terhadap Anak (KtA), dan orientasi standar nasional PKPR.
 - b. Pelaksanaan surveilans penanganan balita beresiko.
 - c. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP).
 - d. Pengadaan buku, media KIE, instrumen pencatatan pelaporan, kesehatan anak kit.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi kerja sama organisasi profesi, LSM, Lintas Program (LP)/ Lintas Sektor (LS).
 - f. Pengembangan program skrining hipotiroid kongenital, puskesmas mampu tata laksana KtA, akselerasi pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), integrasi posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rujukan kesehatan anak.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- g. Pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis program.
 - h. Pelaksanaan review dan evaluasi program.
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dengan kegiatan utama:
- a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi teknis program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dan Sentra Penerapan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T).
 - b. Pelaksanaan fasilitasi integrasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
 - c. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri bidang kesehatan tradisional.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
 - e. Pelaksanaan kegiatan penapisan Sentra Penerapan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T), operasional dan pengembangan Jaringan Informasi Data (JID).
5. Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan kegiatan utama:
- a. Peningkatan layanan kesehatan kerja dan olah raga pada fasilitas layanan kesehatan primer (Puskesmas dan klinik), dan fasilitas layanan kesehatan rujukan (Balai Kesehatan Kerja Masyarakat/BKKM dan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat/BKOM, dan Rumah Sakit).
 - b. Pelaksanaan orientasi/pemantapan/pelatihan kesehatan kerja, olahraga dan perkotaan.
 - c. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program (LP)/lintas sektor (LS) dan organisasi profesi bidang kesehatan kerja, olahraga dan perkotaan.
 - d. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pembentukan tim dan pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif/GP2SP (Gizi pekerja, ASI dan Kesehatan Reproduksi di tempat kerja).
 - e. Pengendalian risiko kesehatan di lingkungan kerja golongan fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomic.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- f. Peningkatan kesehatan pada usia kerja kelompok rentan termasuk nelayan, tenaga kerja migran, dan difabel, serta komunitas di kawasan pemukiman kumuh dan miskin perkotaan.
 - g. Pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha termasuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK).
 - h. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kesehatan kerja, olahraga/kebugaran jasmani dan perkotaan.
6. Dukungan manajemen Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan kegiatan utama:
- a. Pemberian honor pengelolaan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan/monitoring dan evaluasi program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - c. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan BOK.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - e. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk provinsi dan kabupaten/kota TA 2015.
7. Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan kegiatan utama :
- a. Pelaksanaan sosialisasi program BOK tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK;
 - c. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat;
 - d. Pemberian honor tim pengelola BOK provinsi.



- 18 -

Dana Tugas Pembantuan Program Bina Gizi dan KIA dipergunakan untuk :

1. Pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas, dengan kegiatan utama pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas dan manajemen Puskesmas; yang pembagian alokasinya untuk Puskesmas diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan TA 2015;
2. Pelaksanaan manajemen BOK di kabupaten kota;
3. Pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, dengan kegiatan utama pelaksanaan kegiatan dukungan program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer untuk wisata kesehatan jamu.

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN **Rp. 3.207.550.122.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana dekonsentrasi di daerah sebesar Rp.141.490.447.000,- dan dana tugas pembantuan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.036.769.675.000,- dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000.

Dana dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan di daerah, dengan memperhatikan menu dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Bina Upaya Kesehatan (BUK)
 - a. Pertemuan konsultasi perencanaan dan monev program BUK antara Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan dinas kesehatan provinsi.
 - b. Pertemuan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat provinsi dengan satker kabupaten/kota penerima APBN.



- 19 -

- c. Pertemuan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Program BUK antara dinas kesehatan provinsi dengan satker di kabupaten/kota penerima APBN
 - d. Monev dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Dinkes Provinsi ke satker kabupaten/kota penerima anggaran APBN.
 - e. Pertemuan pengelolaan sistem informasi manajemen RS
 - f. Pertemuan Penyusunan *e-planning* program BUK oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya.
2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jiwa
- a. Peningkatan ketrampilan kesehatan jiwa bagi Petugas kesehatan di puskesmas
 - b. Peningkatan keterampilan asesmen dan rencana terapi terkait Wajib Lapor Pecandu Narkotika
 - c. Peningkatan kapasitas dukungan psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana di tingkat provinsi/kab/kota
3. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Dasar
- a. Peningkatan kemampuan teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
 - b. Kegiatan tim pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
 - c. Workshop penguatan pembinaan manajemen puskesmas di dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan pelatihan calon pendamping akreditasi fasyankes primer.
 - e. Workshop penguatan (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
 - f. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - g. Peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung MDG's.
4. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rujukan
- a. *Workshop* Standar Akreditasi Baru/versi 2012.
 - b. *Improvement Colaborative* PONED-PONEK.



- 20 -

- c. Pengembangan Jejaring SPGDT - S Call Center 119
 - d. Pelatihan PPGD di Rumah Sakit
 - e. Pembentukan BPRS Provinsi.
 - f. Bimbingan Teknis Penyusunan SPM di Provinsi.
5. Kegiatan Pembinaan Keperawatan dan Keteknisian Medik
- a. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
 - b. Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Anggaran Tugas Pembantuan Ditjen Bina Upaya Kesehatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.036.769.675.000,- dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000,- digunakan untuk kegiatan sebagai berikut;

A. Bersumber APBN

- 1. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. Pembangunan (pekerjaan konstruksi, perencana, pengawas, pengelola kegiatan) dan pengadaan peralatan rumah sakit Pratama dan rumah sakit bergerak;
 - b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional di RSUD Abdul Wahab syahrane (provinsi Kalimantan Timur) dan RSUD Dok II Jayapura (Provinsi Papua);
 - c. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit daerah
 - d. Pengadaan ambulan untuk penguatan SPGDT RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.
- 2. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
 - a. Pembangunan puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - b. Pembangunan rumah dinas dokter/tenaga kesehatan di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - c. Peningkatan pustu menjadi puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - d. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap untuk daerah terpencil dan sangat terpencil



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- e. Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi puskesmas mampu PONED pada kabupaten MDGs dengan jarak lebih dari 2 jam
- f. Rehabilitasi/renovasi Puskesmas rusak berat dan rusak sedang
- g. Pengadaan Kendaraan
 - Pusling double gardan bagi puskesmas dengan wilayah kerja luas dan medan jalan sulit
 - Ambulans untuk daerah rawan kecelakaan dan bencana
 - Pusling perairan bagi puskesmas dengan wilayah kerja yang sebagian besar hanya bias dijangkau transportasi air.
- h. Pengadaan alat kesehatan bagi puskesmas dengan alat kesehatan tidak lengkap dan tersedia tenaga yang berkompeten dan terlatih
 - Set Pemeriksaan Umum
 - PONED Set
 - Set Tindakan Medis/Gawat darurat
 - Set Kesehatan Gigi dan Mulut
 - Laboratorium Set
 - Set Promosi Kesehatan
 - Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak KB dan Imunisasi
- i. Pengadaan alat penunjang untuk daerah terpencil/sangat terpencil dan tidak ada listrik
 - Sollar Cell
 - Generator
 - Radio Komunikasi
- j. Khusus satker Dinkes Kab. Halmahera Barat (provinsi Maluku Utara) digunakan untuk membayar hutang pengadaan peralatan kesehatan dan ambulan yang belum terbayarkan melalui TP APBN 2014. Pembayaran hutang baru dapat dilaksanakan setelah ada hasil audit BPKP. Selanjutnya sisa anggaran dari pembayaran hutang dapat digunakan sesuai dengan menu diatas.



- 22 -

B. Bersumber APBN Perubahan

Menu Tugas Pembantuan APBN-P untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai berikut:

- a. Pengadaan saran prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional dan diutamakan untuk mendukung terwujudnya pelayanan unggulan subspesialis.
- b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rujukan regional dan provinsi sesuai usulan dengan prioritas penguatan pelayanan Instalasi Gawat darurat (IGD), Penguatan pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU), Penguatan Pelayanan Intensive Care Unit (ICCU), Penguatan Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Penguatan Pelayanan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan tempat tidur Klas III.
- c. Pengadaan ambulans untuk penguatan SPGDT RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT Rp. 503.074.168.000,- DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di daerah tahun 2015 disediakan dana sebesar Rp. 503.074.168.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 386.908.673.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 116.165.495.000 ,-

Anggaran Dekonsentrasi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dialokasikan untuk 6 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Rp. 93.015.138.000,-
2. Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Rp.61.066.482.000,-
3. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 33.939.925.000,-
4. Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 111.866.100.000
5. Kegiatan Penyehatan Lingkungan Rp . 76.821.028.000,-



- 23 -

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp.10.200.000.000,-

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pembinaan Imunisasi melalui:

a. Imunisasi Rutin

- Koordinasi program Imunisasi
- Advokasi dan sosialisasi Program Imunisasi
- Monitoring dan evaluasi kegiatan Imunisasi bagi pengelola dan pelaksana
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

b. Introduksi Vaksin Baru

- Advokasi dan sosialisasi introduksi vaksin
- Pencetakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) introduksi vaksin
- Peningkatan kapasitas pelaksana Imunisasi

2. Pembinaan Surveilans melalui:

a. Investigasi dan Penanggulangan KLB

- Pelaksanaan rumors verifikasi
- Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi
- Koordinasi penanggulangan KLB
- Pengiriman logistik
- Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen dalam rangka KLB

b. Penguatan Kewapadaan Dini KLB Penyakit

- Sosialisasi kesiapsiagaan dan respon Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD)
- Replikasi SKD dan respon
- Peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) di provinsi dan UPT
- Penemuan kasus penyakit potensial KLB
- Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB



- 24 -

- c. Penemuan Kasus Discarded Campak
 - Penemuan kasus discarded campak
 - Operasional pengelolaan data PD3I tingkat provinsi
 - Bimbingan dan evaluasi
3. Pembinaan Karantina Kesehatan melalui:
 - Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)
 - Workshop Sistem Surveilans Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) Terintegrasi
4. Pembinaan Kesehatan Matra melalui:
 - Pemetaan Wilayah dengan Kondisi Matra
 - Peningkatan Kapasitas
 - Surveilans Kesehatan Matra
 - Bimbingan Teknis Program
 - Sosialisasi/Koordinasi Program Kesehatan Matra
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pengendalian Kasus Malaria Melalui :
 - a. Cakupan Penatalaksanaan Kasus Malaria Sesuai Standar
 - Peningkatan dan Penguatan Mutu Pengobatan dan Laboratorium Malaria
 - Koordinasi dan advokasi LS/LP, Kemitraan (Forum Gebrak Malaria Daerah) dan Kemandirian Masyarakat
 - Penguatan E - Sismal dan Surveilans migrasi dalam rangka cegah tangkal penularan malaria
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria menuju eliminasi malaria
 - Assesment peningkatan kasus dan SKD KLB
 - Pedoman dan Media KIE Pengendalian Malaria
 - Peningkatan Kemampuan SDM Malaria di KTI dan daerah Fokus malaria dalam Akselerasi dan intensifikasi
 - Evaluasi pendistribusian dan penggunaan kelambu



- 25 -

- Penguatan Kemandirian masyarakat dan Koordinasi Mitra Terkait
 - Penguatan Sistem Surveilans Malaria (E-Sismal)
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria di KTI dan focus
- b. Cakupan Pendistribusian Kelambu
- Peningkatan dan Penguatan Mutu Pengobatan dan Laboratorium Malaria
 - Koordinasi dan advokasi LS/LP, Kemitraan (Forum Gebrak Malaria Daerah) dan Kemandirian Masyarakat
 - Penguatan E - Sismal dan Surveilans migrasi dalam rangka cegah tangkal penularan malaria
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria menuju eliminasi malaria
 - Assesment peningkatan kasus dan SKD KLB
 - Pedoman dan Media KIE Pengendalian Malaria
 - Peningkatan Kemampuan SDM Malaria di KTI dan daerah Fokus malaria dalam Akselerasi dan intensifikasi
 - Evaluasi pendistribusian dan penggunaan kelambu
 - Penguatan Kemandirian masyarakat dan Koordinasi Mitra Terkait
 - Penguatan Sistem Surveilans Malaria (E-Sismal)
 - Monitoring dan evaluasi P2 Malaria di KTI dan focus
- c. Pengendalian Kasus Arbovirosis Melalui :
- Workshop petugas pengelola
 - Pertemuan/Pembentukan Pokjanal DBD tingkat provinsi
 - Monitoring/kewaspadaan dini KLB arbovirosis
 - Pengumpulan data dari kab/kota
 - Surveilans JE
 - Pelatihan bagi pengelola /dokter RS/Pusk/ jumantik
 - Evaluasi kinerja jumantik
 - Verifikasi data
 - Bimtek dan monev
 - Advokasi kepada Pemda tingkat Kota/Kab
2. Pengendalian Kasus suspect Flu Burung Melalui :
- Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Flu Burung (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Flu Burung



- 26 -

3. Pengendalian Kasus Rabies melalui :
 - Advokasi pengendalian Penyakit Rabies
 - Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Rabies (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
4. Pengendalian Kasus Leptospirosis melalui :
 - Surveilans dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Leptospirosis (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Leptospirosis
5. Pengendalian Kasus Antraks Melalui :
 - Surveilans Dalam Rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Antraks (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Antraks
6. Pengendalian Kasus Pes Melalui :
 - Surveilans Dalam Rangka Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Pes (pelacakan kasus/kewaspadaan dini KLB)
 - Advokasi pengendalian Penyakit Pes
7. Pengendalian Vektor Melalui :
 - Sosialisasi Surveilans dan Pengendalian Vektor bagi Dinkes dan UPT
 - Pelaksanaan survei vektor (*mapping* vektor)
 - Pelatihan tenaga entomologi
 - Pelaksanaan kegiatan evaluasi efektifitas pengendalian vector
8. Pengendalian kasus Filariasis, Buski dan Kecacingan Melalui :
 - Kampanye POMP Filariasis menuju Eliminasi Filariasis
 - Advokasi/Sosialisasi di tingkat Kab/Kota pada pemangku kepentingan untuk mendapatkan komitmen penyediaan biaya operasional POMP
 - Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Puskesmas, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait
 - Penguatan tenaga pelaksana pengendalian program filariasis tingkat kabupaten/kota
9. Pengendalian Schistosomiasis Melalui :
 - Monitoring prevalensi kasus schistosomiasis pada manusia
 - Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Puskesmas, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait



- 27 -

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Pertemuan Evaluasi Kegiatan PPML
2. Pengendalian AIDS dan IMS
3. Pengendalian TB
4. Pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid
5. Pengendalian Kusta dan Frambusia
6. Pengendalian ISPA
7. Bimbingan Teknis, Monitoring Evaluasi, dan Sosialisasi Kegiatan PPML

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2. Pendampingan/advokasi pelaksanaan KTR ke kabupaten/kota
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR ke kabupaten/kota
4. Pelaksanaan pertemuan jejaring kerja KTR
5. Advokasi dan sosialisasi upaya berhenti merokok
6. Pelatihan kab/kota dan fasyankes dalam upaya berhenti merokok
7. Pelatihan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM pada kelompok masyarakat khusus
8. Pendampingan/advokasi pengendalian PTM ke kabupaten/kota
9. Monev dan bimtek serta sosialisasi Pengendalian PTM
10. Pelaksanaan pertemuan jejaring kerja/*workshop* pengendalian PTM
11. Pelaksanaan surveilans PTM
12. Deteksi dini dan monitoring faktor risiko PTM pada kelompok masyarakat khusus
13. Deteksi dini IVA, Papsmear dan CBE pada masyarakat
14. Pelatihan pengendalian PTM pada fasyankes primer



- 28 -

15. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengendalian PTM terintegrasi dan cedera di fasyankes primer
16. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam deteksi dini obesitas
17. Pendistribusian logistik pengendalian PTM

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Penyehatan Lingkungan bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan kemampuan tenaga teknis bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui Pelatihan Monev STBM, Pelatihan Updating *Environmental Health Risk Assessment* (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman *Second Cycle*)
2. Pembinaan terhadap kab/kota yang melaksanakan STBM melalui Pertemuan Advokasi Implementasi PPSP melalui pilar-pilar STBM, Pertemuan Koordinasi Jejaring STBM, Pembinaan Teknis STBM.
3. Tenaga terlatih bidang pengawasan kualitas air minum : Pelatihan Teknis Penyehatan Air, Pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum
4. Pemetaan Kualitas Air Minum : Pertemuan Koordinasi Jejaring Pengawasan Kualitas Air Minum (dekon), Pembinaan Teknis PKAM (dekon)
5. Pembinaan terhadap Kawasan yang memenuhi syarat kesehatan : Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan kab/kota sehat, Dukungan pembinaan pasar sehat
6. Peningkatan kemampuan Tenaga Terlatih bidang penyehatan kawasan : Fasilitasi masyarakat peningkatan kesling di Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan, Orientasi Fasilitator pemberdayaan masyarakat di DTPK, Orientasi fasilitator pasar sehat
7. Pembinaan terhadap Permukiman yang dilakukan pengawasan inspeksi sanitasi : Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Rumah
8. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih Bidang Penyehatan Permukiman : Orientasi Klinik Sanitasi
9. Penyusunan Rencana Aksi Bidang Penyehatan Permukiman : Pelaksanaan Advokasi penyehatan perumahan di Propinsi
10. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang TTU : Orientasi Pemantauan Kesling TTU



- 29 -

11. Penyusunan Rencana kerja bidang TTU : Fasilitas Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren Peningkatan Kesling Sekolah
12. Peningkatan kemampuan Tenaga dan masyarakat terlatih Bidang APIK : Orientasi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan bagi Petugas Kabupaten
13. Penyusunan Rencana kerja bidang Adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim : Advokasi dan Sosialisasi NSPK tentang Adaptasi Perubahan Iklim
14. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan : Implementasi Higiene Sanitasi Pangan di sekolah dan rumah tangga
15. Pembinaan terhadap capaian TPM memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten/kota : Fasilitas, Monev dan Sosialisasi Pengembangan Sentra Makanan Jajanan, Evaluasi Kegiatan 2014 dan Penyiapan Kabupaten/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan Faktor Risiko TPM yang sesuai standar, Surveilans Kualitas TPM
16. Pembinaan terhadap capaian Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan limbah medis : Jejaring kemitraan pengelolaan limbah medis, Pertemuan koordinasi pengelolaan limbah medis, Monev pengelolaan limbah fasyankes
17. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih bidang pengelolaan limbah : Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes
18. Peningkatan kemampuan Tenaga terlatih Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan/ Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan : Pelatihan ADKL/ARKL.
19. Penerapan ADKL/ ARKL sesuai standar : Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Faktor Risiko Lingkungan di daerah

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Penyehatan Lingkungan bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui :

1. Perencanaan dan Anggaran Penyehatan Lingkungan melalui Penyusunan Rencana Kerja Program Pamsimas II Kesehatan di Pusat
2. Peningkatan kemampuan tenaga teknis bidang STBM melalui Pelatihan STBM Program Pamsimas II Kesehatan untuk Petugas Kecamatan/Desa



- 30 -

3. Pelaporan Keuangan dan BMN Penyehatan Lingkungan melalui Dukungan Sekretariat PAMSIMAS Komponen B
4. Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan Lingkungan : Progress Manajemen Report PROGRAM PAMSIMAS II KESEHATAN di Pusat, Aktifitas *Community Lead Total Sanitation* Program PAMSIMAS II Kesehatan, Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Program Pamsimas II Kesehatan, Kampanye Sanitasi dan Higiene Sekolah Program Pamsimas II Kesehatan, Surveilans Kualitas Air Program Pamsimas II Kesehatan, Fasilitas Implementasi di desa Program Pamsimas II Kesehatan, monitoring dan evaluasi oleh petugas Provinsi Program Pamsimas II Kesehatan

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Program PP dan PL pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bersumber pembiayaan dari Rupiah Murni, dialokasikan pada 34 provinsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program yang diprioritaskan untuk:

1. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan penyusunan *E-Planning*.
2. Penyusunan dokumen RKA-KL
3. Pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran
4. Penyusunan profil, buku situasi dan kecenderungan penyakit serta media KIE program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
5. Penyusunan laporan pelaksanaan program PP dan PL, Laporan PP 39 dan Laporan Tahunan
6. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)
7. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker, Rekonsiliasi Anggaran Satker dengan Kementerian Keuangan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran
8. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Tingkat satker dan perubahannya
9. Penyediaan honorarium dan operasional dalam rangka pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber Rupiah Murni dialokasikan untuk kegiatan Penyehatan Lingkungan sebesar Rp. 116.165.495.000,-

Anggaran tersebut dialokasikan pada 116 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi dengan lingkup kegiatan terdiri atas:

1. Kegiatan Fisik Pembangunan Kontruksi Sarana Air Minum untuk :
 - Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna Sarana Air Minum.
 - Fasilitasi Perbaikan Sarana Sanitasi, dan Perubahan Perilaku di Pondok Pesantren.
 - Pembangunan Sarana Perubahan Perilaku dan Sarana Air Bersih Kesehatan Lingkungan di DTPK.
2. Pelaksanaan peningkatan akses air minum melalui kegiatan pertemuan sosialisasi tugas pembantuan direktorat penyehatan lingkungan, dan surveilans sarana air minum dan sanitasi dasar untuk : pengumpulan data dan sarana, penggandaan formulir Inspeksi Sanitasi (IS), pengolahan data dan pelaporan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan ttg sarana air minum.
3. Pelaksanaan pengawasan kualitas air melalui kegiatan surveilans kualitas air dan penyehatan lingkungan.
4. Pelaksanaan penyehatan kawasan sanitasi darurat melalui kegiatan fasilitasi masyarakat di kawasan DTPK dalam pendampingan penyusunan RKM, peyusunan RKM (rencana kerja masyarakat).
5. Pelaksanaan Kegiatan Penyehatan Tempat-Tempat Umum melalui kegiatan Fasilitasi Penyehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dengan tahapan Penjaringan Lokasi Sasaran, Fasilitasi Masyarakat Pontren serta Monitoring dan Evaluasi Kesling di Pontren.
6. Pelaksanaan STBM melalui kegitaan pemicuan desa STBM dan pertemuan teknis tugas pembantuan dan STBM nasional.
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sentra Makanan Jajanan melalui pelatihan penjamah makanan dan peningkatan sarana sanitasi di sentra makanan jajanan
8. Pelaksanaan pengelolaan manajemen program penyehatan lingkungan untuk operasional pembiayaan pengelolaan satker dinkes kabupaten tugas pembantuan



- 32 -

9. Penyusunan laporan keuangan dan BMN melalui kegiatan perjalanan penyusunan laporan konsolidasi keuangan/SAI di provinsi.

V. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Rp. 57.897.000.000

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah tahun 2014 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp.57.897.000.000,-.

Kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi utamanya (Menu Wajib), untuk:

1. Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
3. Advokasi Pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes TK Provinsi-Profil Kefarmasian
5. Biaya Pengelolaan dan Pengemasan kembali obat
6. Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin
7. Harmonisasi dan Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Implementasi Pengelolaan Obat Satu Pintu (*One Gate Policy*)
8. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan pada era JKN
9. Pemantauan penggunaan obat dalam pelaksanaan JKN di Puskesmas dan RS
10. Sampling Produk Alkes dan PKRT
11. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Implementasi Sistem Elektronik pada Binwasdal Alat Kesehatan dan PKRT
12. Sosialisasi e-licensing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmetik/Makanan
13. Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan dan Penanggungjawab Teknis Sarana Distribusi Obat



- 33 -

Di samping itu, terdapat menu tambahan yang dapat dipilih apabila kegiatan pada menu wajib telah terakomodir atau telah tersedia anggaran pada APBD (Menu Pilihan), antara lain:

1. Penerapan *e-logistic* dan *e-catalog*
2. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Vaksin Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
4. Advokasi Implementasi FORNAS kepada *Stakeholder* dan Prescriber di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
5. Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
6. Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan
7. Sosialisasi e-report PBF
8. Penerapan Pengembangan *Software* Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
9. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2015

I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	5,373,104,000			5,373,104,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	11,893,585,000			11,893,585,000
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	12,768,738,000			12,768,738,000
4	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	4,378,107,000			4,378,107,000
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	14,147,462,000			14,147,462,000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	10,850,975,000			10,850,975,000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	12,661,184,000			12,661,184,000
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	7,682,431,000			7,682,431,000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	5,775,596,000			5,775,596,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	5,311,371,000			5,311,371,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	7,123,481,000			7,123,481,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	7,946,443,000			7,946,443,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	6,023,666,000			6,023,666,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	7,089,539,000			7,089,539,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	5,998,601,000			5,998,601,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	5,747,420,000			5,747,420,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	12,154,999,000			12,154,999,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	6,294,984,000			6,294,984,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	7,088,554,000			7,088,554,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	6,972,556,000			6,972,556,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	7,507,922,000			7,507,922,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	6,268,320,000			6,268,320,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	9,516,685,000			9,516,685,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,851,855,000			5,851,855,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	16,092,955,000			16,092,955,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	5,460,360,000			5,460,360,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	7,020,677,000			7,020,677,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	5,068,355,000			5,068,355,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	5,068,361,000			5,068,361,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	5,685,846,000			5,685,846,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	5,266,031,000			5,266,031,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	9,007,444,000			9,007,444,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	4,903,511,000			4,903,511,000
34	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	3,805,182,000			3,805,182,000
JUMLAH:		259,806,300,000	-	-	259,806,300,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	11,275,478,000		-	11,275,478,000
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	35,891,110,000		-	35,891,110,000
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	37,024,137,000		-	37,024,137,000
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	11,940,462,000		-	11,940,462,000
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	60,472,567,000		-	60,472,567,000
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	20,344,762,000		-	20,344,762,000
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	30,486,948,000		-	30,486,948,000
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	17,971,153,000		-	17,971,153,000
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	14,424,828,000		-	14,424,828,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	12,509,174,000		-	12,509,174,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	18,262,436,000		-	18,262,436,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	19,582,334,000		-	19,582,334,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	15,985,680,000		-	15,985,680,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	18,251,429,000		-	18,251,429,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	19,721,394,000		-	19,721,394,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	12,458,164,000		-	12,458,164,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	21,114,600,000		-	21,114,600,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	19,865,542,000		-	19,865,542,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	31,266,606,000		-	31,266,606,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	15,846,858,000		-	15,846,858,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	18,272,445,000		-	18,272,445,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	14,704,062,000		-	14,704,062,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	16,887,485,000		-	16,887,485,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	19,806,381,000		-	19,806,381,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	27,823,608,000		-	27,823,608,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	13,805,649,000		-	13,805,649,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	12,743,708,000		-	12,743,708,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	16,818,349,000		-	16,818,349,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	10,767,813,000		-	10,767,813,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	10,497,788,000		-	10,497,788,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	10,447,370,000		-	10,447,370,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	14,847,952,000		-	14,847,952,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	10,553,545,000		-	10,553,545,000
34	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	6,066,105,000		-	6,066,105,000
JUMLAH:		648,737,922,000	-	-	648,737,922,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

No	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	719,970,000			719,970,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	3,824,538,845			3,824,538,845
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	7,201,535,634			7,201,535,634
4	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	2,171,062,458			2,171,062,458
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	4,668,479,661			4,668,479,661
6	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	5,501,168,004			5,501,168,004
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	6,318,959,088			6,318,959,088
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4,277,730,443			4,277,730,443
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3,029,809,248			3,029,809,248
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	4,657,106,266			4,657,106,266
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	3,923,136,181			3,923,136,181
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	4,467,899,587			4,467,899,587
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	5,956,420,441			5,956,420,441
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1,611,027,450			1,611,027,450
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	2,001,572,279			2,001,572,279
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	2,889,971,892			2,889,971,892
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	6,748,682,433			6,748,682,433
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	4,338,859,366			4,338,859,366
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	4,097,682,632			4,097,682,632
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	6,195,084,676			6,195,084,676
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	5,711,905,645			5,711,905,645
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2,168,692,720			2,168,692,720
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,083,639,264			3,083,639,264
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,465,577,149			6,465,577,149
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	3,203,823,913			3,203,823,913
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	5,133,227,353			5,133,227,353
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	5,834,225,726			5,834,225,726
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	3,349,214,199			3,349,214,199
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	2,787,985,849			2,787,985,849
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	3,084,037,178			3,084,037,178
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2,650,797,004			2,650,797,004
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	8,610,408,997			8,610,408,997
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	3,838,667,024			3,838,667,024
34	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	967,548,397			967,548,397
JUMLAH:		141,490,447,000	-	-	141,490,447,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	8,282,148,000	-	-	8,282,148,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	18,764,608,000	738,600,000	289,088,000	19,792,296,000
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	22,734,473,000	1,718,424,000	567,956,000	25,020,853,000
4	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	6,914,186,000	161,116,000	64,611,000	7,139,913,000
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	16,353,872,000	1,277,728,000	474,200,000	18,105,800,000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	10,547,650,000	223,084,000	81,184,000	10,851,918,000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	13,446,495,000	292,380,000	96,696,000	13,835,571,000
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	11,869,185,000	903,564,000	394,292,000	13,167,041,000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	7,465,231,000	761,772,000	248,006,000	8,475,009,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	9,593,191,000	269,700,000	96,296,000	9,959,187,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	9,090,570,000	728,876,000	284,720,000	10,104,166,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	11,409,776,000	181,546,000	80,953,000	11,672,275,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	15,839,895,000	670,522,000	227,110,000	16,737,527,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	9,255,507,000	558,690,000	185,402,000	9,999,599,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	9,293,000,000	223,978,000	85,023,000	9,602,001,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	10,118,576,000	99,784,000	43,955,000	10,262,315,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	10,884,156,000	1,016,708,000	379,460,000	12,280,324,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	10,700,102,000	693,526,000	285,029,000	11,678,657,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	10,383,446,000	265,984,000	89,911,000	10,739,341,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	8,665,733,000	154,424,000	61,371,000	8,881,528,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	13,080,103,000	477,442,000	265,300,000	13,822,845,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	9,921,702,000	96,714,000	46,208,000	10,064,624,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	8,632,228,000	399,900,000	127,982,000	9,160,110,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	17,360,954,000	1,398,590,000	561,176,000	19,320,720,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	15,788,440,000	161,326,000	52,643,000	16,002,409,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	7,548,635,000	282,482,000	100,916,000	7,932,033,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	11,404,200,000	92,820,000	44,890,000	11,541,910,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	8,782,621,000	230,370,000	89,564,000	9,102,555,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	7,907,955,000	161,608,000	67,256,000	8,136,819,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	5,761,769,000	259,068,000	88,220,000	6,109,057,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	6,781,809,000	191,856,000	116,043,000	7,089,708,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	12,300,559,000	269,236,000	172,148,000	12,741,943,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	6,359,813,000	167,840,000	63,110,000	6,590,763,000
34	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	2,705,708,000			2,705,708,000
JUMLAH:		365,948,296,000	15,129,658,000	5,830,719,000	386,908,673,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	1,838,131,000			1,838,131,000
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2,631,152,000			2,631,152,000
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	2,581,274,000			2,581,274,000
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	1,336,277,000			1,336,277,000
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2,772,754,000			2,772,754,000
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	1,974,096,000			1,974,096,000
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	2,338,608,000			2,338,608,000
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1,830,797,000			1,830,797,000
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1,567,366,000			1,567,366,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,510,038,000			1,510,038,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	1,623,506,000			1,623,506,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1,609,008,000			1,609,008,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,604,470,000			1,604,470,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1,598,240,000			1,598,240,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1,679,709,000			1,679,709,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1,488,356,000			1,488,356,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	1,666,089,000			1,666,089,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1,533,662,000			1,533,662,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2,026,448,000			2,026,448,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,559,342,000			1,559,342,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,534,299,000			1,534,299,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,495,607,000			1,495,607,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,450,910,000			1,450,910,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,850,741,000			1,850,741,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	2,245,104,000			2,245,104,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1,461,973,000			1,461,973,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,454,150,000			1,454,150,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1,495,467,000			1,495,467,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,353,430,000			1,353,430,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1,338,851,000			1,338,851,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,297,332,000			1,297,332,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1,801,589,000			1,801,589,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1,268,214,000			1,268,214,000
34	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	1,080,010,000			1,080,010,000
JUMLAH:		57,897,000,000	-	-	57,897,000,000

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015
TENTANG
TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

I PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Kab. Garut	1,243,442,000			1,243,442,000
2	Dinas Kesehatan Kab. Kuningan	1,243,442,000			1,243,442,000
3	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	1,243,442,000			1,243,442,000
4	Dinas Kesehatan Kab. Sumedang	1,243,442,000			1,243,442,000
5	Dinas Kesehatan Kab. Ciamis	1,243,442,000			1,243,442,000
6	Dinas Kesehatan Kota Bogor	706,584,000			706,584,000
7	Dinas Kesehatan Kota Bandung	702,230,000			702,230,000
8	Dinas Kesehatan Kota Depok	706,584,000			706,584,000
9	Dinas Kesehatan Kab. Karawang	706,584,000			706,584,000
10	Dinas Kesehatan Kab. Jepara	334,305,000			334,305,000
11	Dinas Kesehatan Kab. Magelang	1,039,915,000			1,039,915,000
12	Dinas Kesehatan Kab. Kebumen	334,305,000			334,305,000
13	Dinas Kesehatan Kab. Pemalang	930,130,000			930,130,000
14	Dinas Kesehatan Kab. Banyumas	930,130,000			930,130,000
15	Dinas Kesehatan Kab. Batang	930,130,000			930,130,000
16	Dinas Kesehatan Kota Probolinggo	706,260,000			706,260,000
17	Dinas Kesehatan Kab. Jombang	706,260,000			706,260,000
18	Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso	1,248,898,000			1,248,898,000
19	Dinas Kesehatan Kab. Situbondo	1,248,898,000			1,248,898,000
20	Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan	1,248,898,000			1,248,898,000
21	Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan	1,248,898,000			1,248,898,000
22	Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	1,248,898,000			1,248,898,000
23	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	1,248,898,000			1,248,898,000
24	Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo	1,248,898,000			1,248,898,000
25	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara	1,314,794,000			1,314,794,000
26	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur	1,032,849,000			1,032,849,000
27	Dinas Kesehatan Kab. Bireun	1,032,849,000			1,032,849,000
28	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	1,032,849,000			1,032,849,000
29	Dinas Kesehatan Kab. Pidie	281,945,000			281,945,000
30	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Besar	281,945,000			281,945,000
31	Dinas Kesehatan Kab. Simalungun	1,335,227,000			1,335,227,000
32	Dinas Kesehatan Kab. Samosir	279,325,000			279,325,000
33	Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal	1,055,902,000			1,055,902,000
34	Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu	1,055,902,000			1,055,902,000
35	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	1,055,902,000			1,055,902,000
36	Dinas Kesehatan Kota Medan	700,830,000			700,830,000
37	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar	276,270,000			276,270,000
38	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	1,596,718,000			1,596,718,000
39	Dinas Kesehatan Kab. Agam	276,270,000			276,270,000
40	Dinas Kesehatan Kab. Dharmas Raya	1,046,078,000			1,046,078,000
41	Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung	274,370,000			274,370,000
42	Dinas Kesehatan Kota Solok	702,330,000			702,330,000
43	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	1,046,078,000			1,046,078,000
44	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat	1,046,078,000			1,046,078,000
45	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur	1,343,910,000			1,343,910,000
46	Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat	1,618,751,000			1,618,751,000
47	Dinas Kesehatan Kab. Bungo	1,343,910,000			1,343,910,000
48	Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun	1,343,910,000			1,343,910,000
49	Dinas Kesehatan Kab. Muaro Jambi	1,618,751,000			1,618,751,000
50	Dinas Kesehatan Kab. Batanghari	1,343,910,000			1,343,910,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

I PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
51	Dinas Kesehatan Kab. Marangin	274,841,000			274,841,000
52	Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang	702,330,000			702,330,000
53	Dinas Kesehatan Kab. Lingga	1,103,005,000			1,103,005,000
54	Dinas Kesehatan Kab. Bintan	1,103,005,000			1,103,005,000
55	Dinas Kesehatan Kota Metro	704,478,000			704,478,000
56	Dinas Kesehatan Kab. Mesuji	948,596,000			948,596,000
57	Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul	704,270,000			704,270,000
58	Dinas Kesehatan Kab. Kapuas	1,340,860,000			1,340,860,000
59	Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	1,340,860,000			1,340,860,000
60	Dinas Kesehatan Kab. Kota Waringin Barat	1,340,860,000			1,340,860,000
61	Dinas Kesehatan Kab. Kota Waringin Timur	1,340,860,000			1,340,860,000
62	Dinas Kesehatan Kab. Banjar	277,255,000			277,255,000
63	Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah	1,039,187,000			1,039,187,000
64	Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	1,039,187,000			1,039,187,000
65	Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara	277,255,000			277,255,000
66	Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan	277,255,000			277,255,000
67	Dinas Kesehatan Kab. Tapin	1,039,187,000			1,039,187,000
68	Dinas Kesehatan Kab. Balangan	1,039,187,000			1,039,187,000
69	Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya	277,255,000			277,255,000
70	Dinas Kesehatan Kab. Ketapang	1,627,207,000			1,627,207,000
71	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	277,255,000			277,255,000
72	Dinas Kesehatan Kab. Sambas	1,349,952,000			1,349,952,000
73	Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu	1,349,952,000			1,349,952,000
74	Dinas Kesehatan Kab. Landak	1,349,952,000			1,349,952,000
75	Dinas Kesehatan Kab. Pontianak	1,349,952,000			1,349,952,000
76	Dinas Kesehatan Kab. Donggala	1,347,140,000			1,347,140,000
77	Dinas Kesehatan Kab. Sigi	1,347,140,000			1,347,140,000
78	Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong	721,231,000			721,231,000
79	Dinas Kesehatan Kota Manado	703,190,000			703,190,000
80	Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondo Timur	1,054,704,000			1,054,704,000
81	Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara	1,054,704,000			1,054,704,000
82	Dinas Kesehatan Kab. Luwu	1,620,087,000			1,620,087,000
83	Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto	1,339,752,000			1,339,752,000
84	Dinas Kesehatan Kab. Maros	280,335,000			280,335,000
85	Dinas Kesehatan Kota Makasar	280,335,000			280,335,000
86	Dinas Kesehatan Kab. Enrekang	1,339,752,000			1,339,752,000
87	Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara	1,339,752,000			1,339,752,000
88	Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang	740,054,000			740,054,000
89	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat	1,270,088,000			1,270,088,000
90	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah	1,270,088,000			1,270,088,000
91	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur	1,270,088,000			1,270,088,000
92	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara	1,270,088,000			1,270,088,000
93	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa	1,270,088,000			1,270,088,000
94	Dinas Kesehatan Kab. Dompu	1,270,088,000			1,270,088,000
95	Dinas Kesehatan Kab. Bima	1,270,088,000			1,270,088,000
96	Dinas Kesehatan Kab. Sorong	1,425,001,000			1,425,001,000
97	Dinas Kesehatan Kab. Fakfak	1,425,001,000			1,425,001,000
98	Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar	1,376,872,000			1,376,872,000
99	Dinas Kesehatan Kab. Mamasa	1,376,872,000			1,376,872,000
100	Dinas Kesehatan Kab. Majene	1,376,872,000			1,376,872,000
101	Dinas Kesehatan Kab. Konawe	279,850,000			279,850,000
102	Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan	2,483,290,000			2,483,290,000
103	Dinas Kesehatan Kab. Kolaka	279,850,000			279,850,000
104	Dinas Kesehatan Kab. Muna	2,096,610,000			2,096,610,000
105	Dinas Kesehatan Kab. Muko-Muko	274,841,000			274,841,000
106	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu	983,179,000			983,179,000
107	Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong	274,841,000			274,841,000
108	Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang	332,054,000			332,054,000
109	Dinas Kesehatan Kab. Lebak	332,054,000			332,054,000
110	Dinas Kesehatan Kab. Tangerang	332,054,000			332,054,000
111	Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Aru	814,640,000			814,640,000
112	Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tenggara Barat	814,640,000			814,640,000
113	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai	1,028,843,000			1,028,843,000
114	Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir	1,431,590,000			1,431,590,000
115	Dinas Kesehatan Kab. Kampar	1,431,590,000			1,431,590,000
116	Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu	1,431,590,000			1,431,590,000
	Jumlah	116,165,495,000	-	-	116,165,495,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
I	ACEH	48,681,000,000	-	48,681,000,000
1	Dinkes Kab. Aceh Singkil	3,401,000,000	-	3,401,000,000
2	Dinkes Kab. Aceh Selatan	3,100,000,000	-	3,100,000,000
3	Dinkes Kab. Aceh Tenggara	2,250,000,000	-	2,250,000,000
4	Dinkes Kab. Aceh Timur	4,350,000,000	-	4,350,000,000
5	Dinkes Kab. Aceh Barat	4,100,000,000	-	4,100,000,000
6	Dinkes Kab. Aceh Besar	3,500,000,000	-	3,500,000,000
7	Dinkes Kab. Aceh Barat Daya	3,500,000,000	-	3,500,000,000
8	Dinkes Kab. Gayo Lues	4,000,000,000	-	4,000,000,000
9	Dinkes Kab. Aceh Tamiang	2,000,000,000	-	2,000,000,000
10	Dinkes Kab. Nagan Raya	3,950,000,000	-	3,950,000,000
11	Dinkes Kab. Aceh Jaya	2,700,000,000	-	2,700,000,000
12	Dinkes Kab. Bener Meriah	4,000,000,000	-	4,000,000,000
13	Dinkes Kab. Pidie Jaya	4,350,000,000	-	4,350,000,000
14	Dinkes Kota Banda Aceh	3,480,000,000	-	3,480,000,000
II	SUMATERA UTARA	7,580,588,000	-	7,580,588,000
1	Dinkes Kab. Karo	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Pakpak Barat	1,291,000,000	-	1,291,000,000
3	Dinkes Kota Sibolga	3,289,588,000	-	3,289,588,000
III	SUMATERA BARAT	35,382,900,000	-	35,382,900,000
1	Dinkes Kab. Kepulauan Mentawai	3,200,000,000	-	3,200,000,000
2	Dinkes Kab. Pesisir Selatan	3,450,000,000	-	3,450,000,000
3	Dinkes Kab. Solok	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Sijunjung	3,450,000,000	-	3,450,000,000
5	Dinkes Kab. Padang Pariaman	4,460,000,000	-	4,460,000,000
6	Dinkes Kab. Solok Selatan	3,400,000,000	-	3,400,000,000
7	Dinkes Kab. Dharmas Raya	3,000,000,000	-	3,000,000,000
8	Dinkes Kab. Pasaman Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
9	Dinkes Kota Padang	3,800,000,000	-	3,800,000,000
10	Dinkes Kota Sawah Lunto	2,522,900,000	-	2,522,900,000
IV	RIAU	9,961,482,000	-	9,961,482,000
1	Dinkes Kab. Bengkalis	1,600,000,000	-	1,600,000,000
2	Dinkes Kab. Rokan Hilir	3,911,482,000	-	3,911,482,000
3	Dinkes Kab. Kepulauan Meranti	4,450,000,000	-	4,450,000,000
V	JAMBI	3,400,000,000	-	3,400,000,000
1	Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur	3,400,000,000	-	3,400,000,000
VI	SUMATERA SELATAN	22,050,000,000	21,531,198,000	43,581,198,000
1	Dinkes Kab. Ogan Komering Ulu	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Ogan Komering Ilir	2,500,000,000	21,531,198,000	24,031,198,000
3	Dinkes Kab. Muara Enim	2,500,000,000	-	2,500,000,000
4	Dinkes Kab. Lahat	2,500,000,000	-	2,500,000,000
5	Dinkes Kab. Banyu Asin	4,400,000,000	-	4,400,000,000
6	Dinkes Kab. Ogan Ilir	4,150,000,000	-	4,150,000,000
7	Dinkes Kab. Empat Lawang	3,000,000,000	-	3,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

VII	BENGKULU	26,320,000,000	-	26,320,000,000
1	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	4,750,000,000	-	4,750,000,000
2	Dinkes Kab. Bengkulu Utara	4,750,000,000	-	4,750,000,000
3	Dinkes Kab. Seluma	3,960,000,000	-	3,960,000,000
4	Dinkes Kab. Mukomuko	4,760,000,000	-	4,760,000,000
5	Dinkes Kab. Lebong	4,500,000,000	-	4,500,000,000
6	Dinkes Kab. Bengkulu Tengah	3,600,000,000	-	3,600,000,000
VIII	LAMPUNG	5,724,480,000	-	5,724,480,000
1	Dinkes Kab. Lampung Utara	1,974,480,000	-	1,974,480,000
2	Dinkes Kab. Pesawaran	3,750,000,000	-	3,750,000,000
IX	BANGKA BELITUNG	18,178,128,000	-	18,178,128,000
1	Dinkes Kab. Bangka	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Belitung	2,725,242,000	-	2,725,242,000
3	Dinkes Kab. Bangka Barat	4,115,000,000	-	4,115,000,000
4	Dinkes Kab. Bangka Tengah	3,575,000,000	-	3,575,000,000
5	Dinkes Kab. Bangka Selatan	3,672,886,000	-	3,672,886,000
6	Dinkes Kab. Belitung Timur	1,090,000,000	-	1,090,000,000
X	KEP RIAU	16,718,000,000	-	16,718,000,000
1	Dinkes Kab. Karimun	4,750,000,000	-	4,750,000,000
2	Dinkes Kab. Bintan	3,200,000,000	-	3,200,000,000
3	Dinkes Kab. Natuna	4,118,000,000	-	4,118,000,000
4	Dinkes Kota Batam	4,650,000,000	-	4,650,000,000
XI	DKI JAKARTA	-	-	-
XII	JAWA BARAT	12,700,000,000	-	12,700,000,000
1	Dinkes Kab. Sukabumi	4,850,000,000	-	4,850,000,000
2	Dinkes Kab. Garut	4,850,000,000	-	4,850,000,000
3	Dinkes Kab. Karawang	3,000,000,000	-	3,000,000,000
XIII	JAWA TENGAH	18,000,000,000	-	18,000,000,000
1	Dinkes Kab. Banyumas	2,500,000,000	-	2,500,000,000
2	Dinkes Kab. Banjarnegara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
3	Dinkes Kab. Rembang	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Jepara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
5	Dinkes Kab. Pemalang	2,000,000,000	-	2,000,000,000
6	Dinkes Kab. Tegal	2,500,000,000	-	2,500,000,000
7	Dinkes Kab. Brebes	2,000,000,000	-	2,000,000,000
XIV	DI YOGYAKARTA	14,028,700,000	-	14,028,700,000
1	Dinkes Kab. Kulon Progo	4,290,000,000	-	4,290,000,000
2	Dinkes Kab. Gunung Kidul	2,280,000,000	-	2,280,000,000
3	Dinkes Kab. Sleman	3,958,700,000	-	3,958,700,000
4	Dinkes Kota Yogyakarta	3,500,000,000	-	3,500,000,000
XV	JAWA TIMUR	21,427,909,000	-	21,427,909,000
1	Dinkes Kab. Situbondo	4,500,000,000	-	4,500,000,000
2	Dinkes Kab. Tuban	2,500,000,000	-	2,500,000,000
3	Dinkes Kab. Gresik	3,500,000,000	-	3,500,000,000
4	Dinkes Kab. Bangkalan	4,000,000,000	-	4,000,000,000
5	Dinkes Kab. Sampang	4,700,000,000	-	4,700,000,000
6	Dinkes Kab. Pamekasan	2,227,909,000	-	2,227,909,000
XVI	BANTEN	6,477,500,000	-	6,477,500,000
1	Dinkes Kab. Tangerang	3,477,500,000	-	3,477,500,000
2	Dinkes Kota Cilegon	3,000,000,000	-	3,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

XVII	BALI	10,131,100,000	63,613,000,000	73,744,100,000
1	Dinkes Kab. Jembrana	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Gianyar	816,400,000	-	816,400,000
3	Dinkes Kab. Klungkung	3,000,000,000	30,263,000,000	33,263,000,000
4	Dinkes Kab. Buleleng	3,314,700,000	33,350,000,000	36,664,700,000
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT	27,800,000,000	-	27,800,000,000
1	Dinkes Kab. Lombok Barat	4,100,000,000	-	4,100,000,000
2	Dinkes Kab. Lombok Tengah	4,200,000,000	-	4,200,000,000
3	Dinkes Kab. Lombok Timur	4,400,000,000	-	4,400,000,000
4	Dinkes Kab. Bima	3,350,000,000	-	3,350,000,000
5	Dinkes Kab. Sumbawa Barat	3,650,000,000	-	3,650,000,000
6	Dinkes Kab. Lombok Utara	3,600,000,000	-	3,600,000,000
7	Dinkes Kota Bima	4,500,000,000	-	4,500,000,000
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR	45,817,500,000	-	45,817,500,000
1	Dinkes Kab. Sumba Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
2	Dinkes Kab. Sumba Timur	4,100,000,000	-	4,100,000,000
3	Dinkes Kab. Kupang	3,950,000,000	-	3,950,000,000
4	Dinkes Kab. Timor Tengah Utara	4,000,000,000	-	4,000,000,000
5	Dinkes Kab. Belu	4,667,500,000	-	4,667,500,000
6	Dinkes Kab. Lembata	4,100,000,000	-	4,100,000,000
7	Dinkes Kab. Sikka	4,100,000,000	-	4,100,000,000
8	Dinkes Kab. Rote Ndao	4,000,000,000	-	4,000,000,000
9	Dinkes Kab. Manggarai Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
10	Dinkes Kab. Sumba Tengah	3,600,000,000	-	3,600,000,000
11	Dinkes Kab. Sumba Barat Daya	3,100,000,000	-	3,100,000,000
12	Dinkes Kab. Manggarai Timur	3,000,000,000	-	3,000,000,000
XX	KALIMANTAN BARAT	32,800,000,000	-	32,800,000,000
1	Dinkes Kab. Sambas	4,800,000,000	-	4,800,000,000
2	Dinkes Kab. Bengkayang	4,450,000,000	-	4,450,000,000
3	Dinkes Kab. Pontianak	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Sanggau	4,850,000,000	-	4,850,000,000
5	Dinkes Kab. Ketapang	3,600,000,000	-	3,600,000,000
6	Dinkes Kab. Sintang	4,700,000,000	-	4,700,000,000
7	Dinkes Kab. Sekadau	3,400,000,000	-	3,400,000,000
8	Dinkes Kab. Melawi	4,000,000,000	-	4,000,000,000
XXI	KALIMANTAN TENGAH	4,300,000,000	22,648,630,000	26,948,630,000
1	Dinkes Kab. Katingan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Kotawaringin Timur	-	22,648,630,000	22,648,630,000
XXII	KALIMANTAN SELATAN	9,015,000,000	23,299,956,000	32,314,956,000
1	Dinkes Kab. Tanah Laut	1,915,000,000	-	1,915,000,000
2	Dinkes Kab. Barito Kuala	4,100,000,000	-	4,100,000,000
3	Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
	Dinkes Kab. Hulu Sungai Selatan	-	23,299,956,000	23,299,956,000
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	6,807,000,000	19,000,000,000	25,807,000,000
1	Dinkes Kab. Pasir	1,483,500,000	-	1,483,500,000
2	Dinkes Kab. Kutai Timur	2,701,000,000	-	2,701,000,000
3	Dinkes Kab. Mahakam Hulu *)	2,622,500,000	-	2,622,500,000
4	RSUD Abdul Wahab Sjaharanie	-	19,000,000,000	19,000,000,000
XXIV	KALIMANTAN UTARA	12,110,536,000	-	12,110,536,000
1	Dinkes Kab. Malinau	3,310,536,000	-	3,310,536,000
2	Dinkes Kab. Bulungan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
3	Dinkes Kab. Nunukan	4,500,000,000	-	4,500,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

XXV	SULAWESI UTARA	9,085,000,000	-	9,085,000,000
1	Dinkes Kab. Minahasa Utara	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,800,000,000	-	1,800,000,000
3	Dinkes Kota Manado	2,985,000,000	-	2,985,000,000
XXVI	SULAWESI TENGAH	23,820,000,000	71,640,622,000	95,460,622,000
1	Dinkes Kab. Morowali	4,191,000,000	17,757,272,000	21,948,272,000
2	Dinkes Kab. Buol	3,410,000,000	-	3,410,000,000
3	Dinkes Kab. Parigi Moutong	3,786,000,000	19,716,423,000	23,502,423,000
4	Dinkes Kab. Tojo Una-una	2,996,000,000	-	2,996,000,000
5	Dinkes Kab. Sigi	3,120,000,000	-	3,120,000,000
6	Dinkes Kab. Banggai Laut *)	3,256,000,000	-	3,256,000,000
7	Dinkes Kab. Morowali Utara *)	3,061,000,000	-	3,061,000,000
8	Dinkes Kab. Banggai	-	17,684,172,000	17,684,172,000
9	Dinkes Kab. Banggai Kepulauan	-	16,482,755,000	16,482,755,000
XXVII	SULAWESI SELATAN	18,900,000,000	23,132,787,000	42,032,787,000
1	Dinkes Kab. Kepulauan Selayar	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Bulukumba	2,500,000,000	-	2,500,000,000
3	Dinkes Kab. Janeponto	2,500,000,000	-	2,500,000,000
4	Dinkes Kab. Pangkajene Kepulauan	4,600,000,000	-	4,600,000,000
5	Dinkes Kab. Luwu	2,500,000,000	-	2,500,000,000
6	Dinkes Kab. Toraja Utara	2,500,000,000	23,132,787,000	25,632,787,000
XXVIII	SULAWESI TENGGARA	38,232,500,000	-	38,232,500,000
1	Dinkes Kab. Buton	3,900,000,000	-	3,900,000,000
2	Dinkes Kab. Konawe	4,632,500,000	-	4,632,500,000
3	Dinkes Kab. Wakatobi	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Kolaka Utara	5,400,000,000	-	5,400,000,000
5	Dinkes Kab. Buton Utara	4,500,000,000	-	4,500,000,000
6	Dinkes Kab. Konawe Utara	3,550,000,000	-	3,550,000,000
7	Dinkes Kota Kendari	4,000,000,000	-	4,000,000,000
8	Dinkes Kota Bau-bau	4,550,000,000	-	4,550,000,000
9	Dinkes Kab. Kolaka Timur *)	4,700,000,000	-	4,700,000,000
XXIX	GORONTALO	8,804,854,000	-	8,804,854,000
1	Dinkes Kab. Boalemo	2,000,000,000	-	2,000,000,000
2	Dinkes Kab. Pohuwato	2,404,854,000	-	2,404,854,000
3	Dinkes Kab. Gorontalo Utara	4,400,000,000	-	4,400,000,000
XXX	SULAWESI BARAT	17,793,323,000	-	17,793,323,000
1	Dinkes Kab. Majene	3,743,323,000	-	3,743,323,000
2	Dinkes Kab. Polewali Mandar	4,650,000,000	-	4,650,000,000
3	Dinkes Kab. Mamuju	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Mamuju Utara	4,900,000,000	-	4,900,000,000
XXXI	MALUKU	25,625,000,000	-	25,625,000,000
1	Dinkes Kab. Maluku Tenggara Barat	4,000,000,000	-	4,000,000,000
2	Dinkes Kab. Maluku Tenggara	4,625,000,000	-	4,625,000,000
3	Dinkes Kab. Maluku Tengah	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Buru	3,350,000,000	-	3,350,000,000
5	Dinkes Kab. Seram Bagian Barat	4,850,000,000	-	4,850,000,000
6	Dinkes Kab. Buru Selatan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
XXXII	MALUKU UTARA	26,100,000,000	-	26,100,000,000
1	Dinkes Kab. Halmahera Barat	3,950,000,000	-	3,950,000,000
2	Dinkes Kab. Halmahera Tengah	4,750,000,000	-	4,750,000,000
3	Dinkes Kab. Halmahera Selatan	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Halmahera Timur	4,550,000,000	-	4,550,000,000
5	Dinkes Kota Ternate	4,300,000,000	-	4,300,000,000
6	Dinkes Kota Tidore Kepulauan	4,050,000,000	-	4,050,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
A. BERSUMBER APBN

XXXIII	PAPUA BARAT	38,401,677,000	-	38,401,677,000
1	Dinkes Kab. Kaimana	4,500,000,000	-	4,500,000,000
2	Dinkes Kab. Teluk Wondama	4,500,000,000	-	4,500,000,000
3	Dinkes Kab. Teluk Bintuni	4,880,000,000	-	4,880,000,000
4	Dinkes Kab. Manokwari	4,521,677,000	-	4,521,677,000
5	Dinkes Kab. Sorong Selatan	4,500,000,000	-	4,500,000,000
6	Dinkes Kab. Sorong	3,500,000,000	-	3,500,000,000
7	Dinkes Kab. Raja Ampat	4,500,000,000	-	4,500,000,000
8	Dinkes Kab. Tamberauw	3,000,000,000	-	3,000,000,000
9	Dinkes Kota Sorong	4,500,000,000	-	4,500,000,000
XXXIV	PAPUA	32,439,000,000	137,290,305,000	169,729,305,000
1	RSUD Dok II Jayapura	-	21,000,000,000	21,000,000,000
2	Dinkes Kab. Jayapura	4,779,500,000	-	4,779,500,000
3	Dinkes Kab. Boven Digoel	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Sarmi	4,420,500,000	-	4,420,500,000
5	Dinkes Kab. Supiori	4,000,000,000	-	4,000,000,000
6	Dinkes Kab. Nduga	4,900,000,000	59,222,804,000	64,122,804,000
7	Dinkes Kab. Dogiyai	4,939,000,000	-	4,939,000,000
8	Dinkes Kab. Intan Jaya	4,900,000,000	57,067,501,000	61,967,501,000
	Total	654,613,177,000	382,156,498,000	1,036,769,675,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
B. BERSUMBER APBN-P

1. Penguatan RS Rujukan Provinsi dan Regional

NO	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	SATKER PENGELOLA		ALOKASI
I	PROVINSI ACEH			91,354,000,000
1	Kab. Aceh Tengah	1	RSUD Datu Beru Takengon	4,038,000,000
2	Kab. Bireuen	2	RSUD Dr.Fauziah Bireuen	11,316,000,000
3	Kota Langsa	3	RSUD Kota Langsa	18,000,000,000
4	Kab. Aceh selatan	4	RSUD DR H. Yulidin Away	18,000,000,000
5	Kab. Aceh Barat	5	RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh	18,000,000,000
6	Kota Banda Aceh	6	RSUD dr. Zainoel Abidin	22,000,000,000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			76,601,000,000
1	Kota Medan	7	RSU Haji Provinsi	18,000,000,000
2	Kota Pematang Siantar	8	RSUD dr. Djasamen Saragih	11,976,000,000
3	Kab. Labuhan Batu	9	RSUD Rantauprapat	13,125,000,000
4	Kota Padang sidempuan	10	RSUD Padang Sidempuan	5,500,000,000
5	Kab. Nias	11	RSU Gunung Sitoli	18,000,000,000
6	Kota Medan	12	RSUD Pirngadi	10,000,000,000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			51,493,000,000
1	Kota Solok	13	RSUD Kota Solok	18,000,000,000
2	Kota Pariaman	14	RSUD Provinsi Pariaman	18,000,000,000
3	Kota Bukittinggi	15	RSUD Achmad Mochtar	15,493,000,000
IV	PROVINSI RIAU			54,853,000,000
1	Kota Dumai	16	RSUD Dumai	7,784,000,000
2	Kab. Bengkalis	17	RSUD Bengkalis	3,907,000,000
3	Kab. Kampar	18	RSUD Bangkinang	6,393,000,000
4	Kab. Pelalawan	19	RSUD Selasih	14,769,000,000
5	Kota Pekanbaru	20	RSUD Arifin Achmad	22,000,000,000
V	PROVINSI JAMBI			58,000,000,000
1	Kab. Bungo	21	RSUD H. Hanafie	18,000,000,000
2	Kab. Muaro Jambi	22	RSUD Muaro Jambi	18,000,000,000
3	Kota Jambi	23	RSUD Raden Mattaher	22,000,000,000
VI	PROVINSI SUMATERA SELATAN			47,006,000,000
1	Kota Palembang	24	RSUD Palembang Bari	18,000,000,000
2	Kota Lubuk Linggau	25	RSUD Siti Aisyah	18,000,000,000
3	Kab. Muara Enim	26	RSUD Rabain Muara Enim	3,493,000,000
4	Kab. Ogan Komering Ulu	27	RSUD Ibnu Sutowo Baturaja	7,513,000,000
VII	PROVINSI BENGKULU			71,872,000,000
1	Kab. Muko-Muko	28	RSUD Muko-Muko	19,000,000,000
2	Kab. Rejang Lebong	29	RSU Curup	15,872,000,000
3	Kab. Bengkulu Selatan	30	RSUD Hasanuddin Damrah Manna	15,000,000,000
4	Kota Bengkulu	31	RSUD M.Yunus	22,000,000,000
VIII	PROVINSI LAMPUNG			50,000,000,000
1	Kota Metro	32	RSUD.A.Yani	18,000,000,000
2	Kab. Tulang Bawang	33	RSUD Menggala	10,000,000,000
3	Kota Bandar Lampung	34	RSUD dr. A. Moeloek	22,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	SATKER PENGELOLA		ALOKASI
IX	PROVINSI BANGKA BELITUNG			40,000,000,000
1	Kab.Belitung	35	RSUD dr. H. Marsidi Judono	18,000,000,000
2	Kab. Bangka	36	RSUD dr. HC Soekarno	22,000,000,000
X	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			30,171,000,000
1	Kota Batam	37	RSUD Embung Fatimah	18,000,000,000
2	Kota Tanjung Pinang	38	RSUD Provinsi Kepulauan Riau	12,171,000,000
XI	PROVINSI JAWA BARAT			103,312,000,000
1	Kab. Bandung	39	RSUD Al Ihsan	18,000,000,000
2	Kota Cimahi	40	RSUD Cibabat	9,745,000,000
3	Kota Tasikmalaya	41	RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	18,000,000,000
4	Kota Cirebon	42	RSUD Gunung Jati	18,000,000,000
5	Kab. Karawang	43	RSUD Karawang	10,700,000,000
6	Kab. Bogor	44	RSUD Cibinong	10,867,000,000
7	Kota Sukabumi	45	RSUD Syamsudin	18,000,000,000
XII	PROVINSI JAWA TENGAH			118,496,000,000
1	Kota Surakarta	46	RSUD Dr. Moewardi	18,000,000,000
2	Kota Banyumas	47	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	18,000,000,000
3	Kota Semarang	48	RSU Tugurejo	18,000,000,000
4	Kota Tegal	49	RSUD Kardinah	18,000,000,000
5	Kota Magelang	50	RSUD Tidar	10,496,000,000
6	Kab. Pekalongan	51	RSUD Kraton	18,000,000,000
7	Kab. Pati	52	RSUD RAA. Soewondo	18,000,000,000
XIII	PROVINSI DI YOGYAKARTA			3,846,000,000
1	Kota Yogyakarta	53	RSUD Yogya - Wirosaban	3,846,000,000
XIV	PROVINSI JAWA TIMUR			103,097,000,000
1	Kota Malang	54	RSUD dr. Saiful Anwar	18,000,000,000
2	Kab. Gresik	55	RSUD Ibnu Sina Gresik	18,000,000,000
3	Kota Surabaya	56	RSUD Haji Surabaya	18,000,000,000
4	Kota Madiun	57	RSUD Soedono Madiun	13,097,000,000
5	Kab. Jombang	58	RSUD Jombang	18,000,000,000
6	Kab. Jember	59	RSUD Soebandi Jember	18,000,000,000
XV	PROVINSI BANTEN			40,000,000,000
1	Kab. Serang	60	RSUD Serang	18,000,000,000
2	Kab. Tangerang	61	RSUD Kab. Tangerang	22,000,000,000
XVI	BALI			19,740,000,000
1	Kab. Tabanan	62	RSUD Tabanan	8,598,000,000
2	Kota Gianyar	63	RSUD Sanjiwani	11,142,000,000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			40,000,000,000
1	Kota Sumbawa	64	RSUD Propinsi di Sumbawa	18,000,000,000
2	Kota Mataram	65	RSUD Propinsi NTB	22,000,000,000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			88,981,000,000
1	Kab. Belu	66	RSUD MGR Gabriel Manek	18,000,000,000
2	Kab. Sikka	67	RSUD dr TC Hillers Maumere	18,000,000,000
3	Kab. Manggarai	68	RSUD Ruteng	18,000,000,000
4	Kab. Sumba Timur	69	RSUD Umbu Rara Waingapu.	12,981,000,000
5	Kab. Kupang	70	RSUD Prof. dr. WZ Johanes	22,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	SATKER PENGELOLA		ALOKASI
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			61,146,000,000
1	Kota Singkawang	71	RSUD Dr Abdul Azis	18,000,000,000
2	Kab. Sintang	72	RSUD Ade Muhammad Djoen	18,000,000,000
3	Kab. Sanggau	73	RSUD Kab. Sanggau	11,710,000,000
4	Kab. Ketapang	74	RSUD Dr. Agoesdjam	13,436,000,000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			62,047,000,000
1	Kotawaringin Timur	75	RSUD Murjani Sampit	18,000,000,000
2	Kotawaringin Barat	76	RSUD Imanuddin Pangkalan Bun	18,000,000,000
3	Kab. Barito Utara	77	RSUD Muara Teweh	4,047,000,000
4	Kota Palangka Raya	78	RSUD dr. Doris Sylvanus	22,000,000,000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			67,601,000,000
1	Kota Banjarmasin	79	RSUD M.Ansari Saleh	10,020,000,000
2	Kab. Banjar	80	RSUD Ratu Zalecha	11,475,000,000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	81	RSUD H Hasan Basry	14,106,000,000
4	Kab. Kotabaru	82	RSUD Kotabaru	10,000,000,000
5	Kota Banjarmasin	83	RSUD Ulin Banjarmasin	22,000,000,000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			28,058,000,000
1	Kab. Kutai Kartanegara	84	RSUD AM Parikesit Tenggarong	10,920,000,000
2	Kota Samarinda	85	RSUD Inche Abdoel Moeis	17,138,000,000
XXIII	PROVINSI SULAWESI UTARA			58,185,000,000
1	Kota Minahasa	86	RSUD Noongan	18,000,000,000
2	Kab. Kepulauan Sangihe	87	RSUD Liun Kendage	18,000,000,000
3	Kab. Minahasa Utara	88	RSUD Maria Walanda Maramis	3,000,000,000
4	Kota Kotamobagu	89	RSUD Popundayan	19,185,000,000
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			89,535,000,000
1	Kab. Toli-Toli	90	RSUD Mokopido Toli-Toli	13,535,000,000
2	Kab. Parigi Moutong	91	RSUD Anuntaloko-Parigi Moutong	18,000,000,000
3	Kab. Banggai	92	RS Luwuk	18,000,000,000
4	Kab. Morowali	93	RSUD Morowali	18,000,000,000
5	Kota Palu	94	RSUD Undata	22,000,000,000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			108,000,000,000
1	Kota Polopo	95	RSUD Sawerigading	18,000,000,000
2	Kab. Bone	96	RSUD Tenriawaru Bone	18,000,000,000
3	Kab. Parepare	97	RSUD Andi Makassar	18,000,000,000
4	Kab. Bulukumba	98	RSUD HA Sulthan Daeng Raja	18,000,000,000
5	Kota Makassar	99	RSUD Daya Makassar	18,000,000,000
6	Kota Makassar	100	RSUD Labuang Baji	18,000,000,000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			44,192,000,000
1	Kota Bau-Bau	101	RSUD Kota Bau-Bau	18,000,000,000
2	Kab. Kolaka	102	RSUD Bunyamin Guluh	4,192,000,000
3	Kota Kendari	103	RSUD Bahtera Mas	22,000,000,000
XXVII	PROVINSI GORONTALO			46,881,000,000
1	Kab. Gorontalo	104	RSUD dr. M Mohammad Dunda	18,000,000,000
2	Kab. Boalemo	105	RSUD Tani dan Nelayan	6,881,000,000
3	Kota Gorontalo	106	RSUD Prof. Aloei Saboe	22,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	SATKER PENGELOLA		ALOKASI
XXVIII	PROVINSI SULAWESI BARAT			40,000,000,000
1	Kab. Polewali Mandar	107	RSUD Kab. Polewali Mandar	18,000,000,000
2	Kab. Mamuju	108	RSUD Propinsi Sulbar	22,000,000,000
XXIX	PROVINSI MALUKU			49,131,000,000
1	Kab. Buru	109	RSU Namlea	3,310,000,000
2	Kab. Maluku Tenggara	110	RSU Karel Sadsuitubun	5,821,000,000
3	Kab. Maluku Tengah	111	RSU Masohi	18,000,000,000
4	Kota Ambon	112	RSUD Dr. M. Haulusy	22,000,000,000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			59,637,000,000
1	Kota Tidore Kepulauan	113	RSU Kota Tidore Kepulauan	15,077,000,000
2	Kab. Halmahera Selatan	114	RSUD Labuha	13,000,000,000
3	Kab. Halmahera Utara	115	RSUD Tubelo	9,560,000,000
4	Kab. Ternate	116	RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie	22,000,000,000
XXXI	PROVINSI PAPUA			77,000,000,000
1	Kota Jayapura	117	RSUD Abepura	18,000,000,000
2	Kab. Jayawijaya	118	RSUD Wamena	19,000,000,000
3	Kab. Nabire	119	RSUD Nabire	10,000,000,000
4	Kab. Merauke	120	RSUD Merauke	10,000,000,000
5	Kab. Biak Numfor	121	RSUD Biak	10,000,000,000
6	Kab. Mimika	122	RSUD Mimika	10,000,000,000
XXXII	PROVINSI PAPUA BARAT			33,855,000,000
1	Kab. Manokwari	123	RSUD Kabupaten Manokwari	11,855,000,000
2	Kab. Sorong	124	RSUD Kabupaten Sorong	22,000,000,000
XXXIII	PROVINSI DKI JAKARTA			50,000,000,000
1	Kota Jakarta Pusat	125	RSUD Tarakan	10,000,000,000
2	Kota Jakarta Utara	126	RSUD Koja	10,000,000,000
3	Kota Jakarta Barat	127	RSUD Cengkareng	10,000,000,000
4	Kota Jakarta Selatan	128	RSUD Pasar Rebo	10,000,000,000
5	Kota Jakarta Timur	129	RSUD Budi Asih	10,000,000,000
XXXIV	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			22,000,000,000
1	Kota Tarakan	130	RSUD Tarakan	22,000,000,000
JUMLAH				1,986,090,000,000

2. Penguatan RS Rujukan Nasional

NO	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	SATKER PENGELOLA		ALOKASI
I	PROVINSI JAWA TIMUR			20,000,000,000
1	Kota Surabaya	1	RSUD Dr Soetomo	20,000,000,000
II	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			23,200,000,000
1	Kota Pontianak	1	RSUD M. Soedarso	23,200,000,000
JUMLAH				43,200,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
I	PROVINSI ACEH					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Simeulue	1,315,645,000	187,000,000	-	1,502,645,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Singkil	1,409,058,000	205,000,000	-	1,614,058,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Selatan	2,977,343,000	421,000,000	-	3,398,343,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Tenggara	2,054,495,000	331,000,000	-	2,385,495,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Timur	4,064,363,000	475,000,000	-	4,539,363,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Tengah	1,537,937,000	259,000,000	-	1,796,937,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Barat	1,727,200,000	241,000,000	-	1,968,200,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Besar	4,702,289,000	511,000,000	-	5,213,289,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pidie	3,433,384,000	475,000,000	-	3,908,384,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bireuen	2,393,877,000	331,000,000	-	2,724,877,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Utara	4,588,982,000	565,000,000	-	5,153,982,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Barat Daya	1,703,007,000	241,000,000	-	1,944,007,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gayo Lues	1,508,055,000	223,000,000	-	1,731,055,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Tamiang	1,676,629,000	259,000,000	-	1,935,629,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nagan Raya	1,807,953,000	259,000,000	-	2,066,953,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Aceh Jaya	1,332,563,000	187,000,000	-	1,519,563,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bener Meriah	1,434,492,000	205,000,000	-	1,639,492,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pidie Jaya	1,544,602,000	205,000,000	-	1,749,602,000
19	Dinas Kesehatan	Kota Banda Aceh	918,267,000	205,000,000	-	1,123,267,000
20	Dinas Kesehatan	Kota Sabang	489,030,000	115,000,000	-	604,030,000
21	Dinas Kesehatan	Kota Langsa	414,903,000	100,000,000	-	514,903,000
22	Dinas Kesehatan	Kota Lhokseumawe	510,911,000	115,000,000	-	625,911,000
23	Dinas Kesehatan	Kota Subulussalam	399,207,000	100,000,000	-	499,207,000
JUMLAH:			43,944,192,000	6,215,000,000	-	50,159,192,000
II	SUMATERA UTARA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nias	1,228,233,000	186,000,000	-	1,414,233,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mandailing Natal	2,942,678,000	474,000,000	-	3,416,678,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	1,813,585,000	294,000,000	-	2,107,585,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapanuli Tengah	3,086,946,000	420,000,000	-	3,506,946,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2,116,130,000	348,000,000	-	2,464,130,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Toba Samosir	2,131,131,000	348,000,000	-	2,479,131,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Labuhan Batu	1,507,751,000	240,000,000	-	1,747,751,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Asahan	2,791,029,000	402,000,000	-	3,193,029,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Simalungun	4,583,125,000	618,000,000	-	5,201,125,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Dairi	2,028,102,000	330,000,000	-	2,358,102,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karo	2,150,418,000	348,000,000	-	2,498,418,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Deli Serdang	4,861,149,000	618,000,000	-	5,479,149,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Langkat	3,951,447,000	546,000,000	-	4,497,447,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nias Selatan	4,548,529,000	654,000,000	-	5,202,529,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Humbang Hasundutan	1,292,290,000	222,000,000	-	1,514,290,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pakpak Bharat	957,773,000	150,000,000	-	1,107,773,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Samosir	1,266,800,000	222,000,000	-	1,488,800,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Serdang Bedagai	2,432,405,000	366,000,000	-	2,798,405,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Batu Bara	1,477,204,000	240,000,000	-	1,717,204,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Padang Lawas Utara	1,877,082,000	312,000,000	-	2,189,082,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Padang Lawas	1,473,196,000	258,000,000	-	1,731,196,000
22	Dinas Kesehatan	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1,841,290,000	312,000,000	-	2,153,290,000
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Labuhan Batu Utara	2,052,205,000	312,000,000	-	2,364,205,000
24	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nias Utara	1,402,235,000	204,000,000	-	1,606,235,000
25	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nias Barat	953,713,000	150,000,000	-	1,103,713,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
26	Dinas Kesehatan	Kota Sibolga	325,381,000	90,000,000	-	415,381,000
27	Dinas Kesehatan	Kota Tanjung Balai	663,093,000	150,000,000	-	813,093,000
28	Dinas Kesehatan	Kota Pematang Siantar	1,579,669,000	348,000,000	-	1,927,669,000
29	Dinas Kesehatan	Kota Tebing Tinggi	739,636,000	168,000,000	-	907,636,000
30	Dinas Kesehatan	Kota Medan	3,712,047,000	708,000,000	-	4,420,047,000
31	Dinas Kesehatan	Kota Binjai	670,838,000	150,000,000	-	820,838,000
32	Dinas Kesehatan	Kota Padangsidimpuan	725,424,000	168,000,000	-	893,424,000
33	Dinas Kesehatan	Kota Gunungsitoli	485,985,000	114,000,000	-	599,985,000
JUMLAH:			65,668,519,000	10,470,000,000	-	76,138,519,000
III	SUMATERA BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,314,517,000	185,000,000		1,499,517,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pesisir Selatan	2,448,861,000	329,000,000		2,777,861,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Solok	2,413,333,000	329,000,000		2,742,333,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sijunjung	1,567,608,000	221,000,000		1,788,608,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanah Datar	2,600,544,000	419,000,000		3,019,544,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Padang Pariaman	3,488,608,000	455,000,000		3,943,608,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Agam	2,541,239,000	401,000,000		2,942,239,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,425,029,000	401,000,000		2,826,029,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pasaman	1,686,961,000	293,000,000		1,979,961,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Solok Selatan	1,053,869,000	149,000,000		1,202,869,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Dharmas Raya	1,713,271,000	239,000,000		1,952,271,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pasaman Barat	2,219,340,000	311,000,000		2,530,340,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Padang	1,998,030,000	401,000,000		2,399,030,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Solok	240,000,000	90,000,000		330,000,000
15	Dinas Kesehatan	Kota Sawah Lunto	360,000,000	113,000,000		473,000,000
16	Dinas Kesehatan	Kota Padang Panjang	240,000,000	90,000,000		330,000,000
17	Dinas Kesehatan	Kota Bukittinggi	564,943,000	131,000,000		695,943,000
18	Dinas Kesehatan	Kota Payakumbuh	645,273,000	149,000,000		794,273,000
19	Dinas Kesehatan	Kota Pariaman	566,258,000	131,000,000		697,258,000
20	Dinas Kesehatan	Kota Pariaman				-
JUMLAH:			30,087,684,000	4,837,000,000	-	34,924,684,000
IV	RIAU					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kuantan Singingi	2,672,748,000	419,000,000		3,091,748,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Indragiri Hulu	2,027,764,000	329,000,000		2,356,764,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Indragiri Hilir	3,017,949,000	455,000,000		3,472,949,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pelalawan	1,362,219,000	221,000,000		1,583,219,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Siak	900,000,000	275,000,000		1,175,000,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kampar	4,021,391,000	563,000,000		4,584,391,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rokan Hulu	2,439,940,000	383,000,000		2,822,940,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkalis	660,000,000	203,000,000		863,000,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rokan Hilir	2,023,444,000	311,000,000		2,334,444,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Meranti	958,559,000	167,000,000		1,125,559,000
11	Dinas Kesehatan	Kota Pekanbaru	1,802,668,000	365,000,000		2,167,668,000
12	Dinas Kesehatan	Kota Dumai	540,000,000	167,000,000		707,000,000
JUMLAH:			22,426,682,000	3,858,000,000	-	26,284,682,000
V	JAMBI					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kerinci	1,775,779,000	329,000,000		2,104,779,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Merangin	2,029,456,000	347,000,000		2,376,456,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sarolangun	1,986,483,000	239,000,000		2,225,483,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Batang Hari	2,130,417,000	311,000,000		2,441,417,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Muaro Jambi	2,101,190,000	329,000,000		2,430,190,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,417,820,000	311,000,000		1,728,820,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,685,157,000	293,000,000		1,978,157,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tebo	1,852,795,000	257,000,000		2,109,795,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bungo	1,551,096,000	329,000,000		1,880,096,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Jambi	1,708,301,000	365,000,000		2,073,301,000
11	Dinas Kesehatan	Kota Sungai Penuh	360,000,000	113,000,000		473,000,000
JUMLAH:			18,598,494,000	3,223,000,000	-	21,821,494,000
VI	SUMATERA SELATAN					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1,861,408,000	292,000,000	-	2,153,408,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,770,466,000	526,000,000	-	5,296,466,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Muara Enim	2,286,855,000	346,000,000	-	2,632,855,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lahat	4,412,411,000	562,000,000	-	4,974,411,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Musi Rawas	2,799,208,000	346,000,000	-	3,145,208,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Musi Banyuasin	3,046,293,000	472,000,000	-	3,518,293,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banyu Asin	4,428,660,000	526,000,000	-	4,954,660,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten mering Ulu Selatan	2,494,904,000	346,000,000	-	2,840,904,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Komering Ulu Timur	2,798,887,000	400,000,000	-	3,198,887,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Ilir	3,758,596,000	454,000,000	-	4,212,596,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Empat Lawang	995,444,000	148,000,000	-	1,143,444,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Abab Lematang Ilir	722,164,000	112,000,000	-	834,164,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Musi Rawas Utara	1,178,614,000	148,000,000	-	1,326,614,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Palembang	3,492,109,000	706,000,000	-	4,198,109,000
15	Dinas Kesehatan	Kota Prabumulih	666,477,000	148,000,000	-	814,477,000
16	Dinas Kesehatan	Kota Pagar Alam	573,956,000	130,000,000		703,956,000
17	Dinas Kesehatan	Kota Lubuklinggau	739,297,000	166,000,000		905,297,000
JUMLAH:			41,025,749,000	5,828,000,000	-	46,853,749,000
VII	BENGKULU					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	1,477,407,000	257,000,000		1,734,407,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rejang Lebong	2,295,063,000	383,000,000		2,678,063,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Utara	2,511,050,000	401,000,000		2,912,050,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kaur	2,009,387,000	293,000,000		2,302,387,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Seluma	2,865,263,000	401,000,000		3,266,263,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mukomuko	2,260,564,000	311,000,000		2,571,564,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lebong	1,729,396,000	257,000,000		1,986,396,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepahiang	1,742,028,000	257,000,000		1,999,028,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Tengah	2,569,256,000	365,000,000		2,934,256,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Bengkulu	1,688,375,000	365,000,000		2,053,375,000
JUMLAH:			21,147,789,000	3,290,000,000	-	24,437,789,000
VIII	LAMPUNG					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Barat	1,660,997,000	220,000,000		1,880,997,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanggamus	2,671,450,000	418,000,000		3,089,450,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Selatan	3,360,560,000	472,000,000		3,832,560,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Timur	4,360,239,000	598,000,000		4,958,239,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Tengah	4,972,912,000	670,000,000		5,642,912,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Utara	3,910,406,000	472,000,000		4,382,406,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Way Kanan	2,690,451,000	346,000,000		3,036,451,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tulangbawang	1,935,052,000	328,000,000		2,263,052,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pesawaran	1,634,604,000	220,000,000		1,854,604,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pringsewu	1,188,528,000	202,000,000		1,390,528,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mesuji	1,232,286,000	220,000,000		1,452,286,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tulangbawang Barat	969,387,000	166,000,000		1,135,387,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pesisir Barat	1,245,747,000	166,000,000		1,411,747,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Bandar Lampung	2,688,494,000	544,000,000		3,232,494,000
15	Dinas Kesehatan	Kota Metro	921,989,000	202,000,000		1,123,989,000
JUMLAH:			35,443,102,000	5,244,000,000	-	40,687,102,000
IX	KEPULAUAN RIAU					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karimun	995,948,000	167,000,000		1,162,948,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bintan	840,000,000	257,000,000		1,097,000,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Natuna	1,643,624,000	239,000,000		1,882,624,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lingga	763,310,000	131,000,000		894,310,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	922,728,000	131,000,000		1,053,728,000
6	Dinas Kesehatan	Kota Batam	1,497,594,000	311,000,000		1,808,594,000
7	Dinas Kesehatan	Kota Tanjung Pinang	491,793,000	113,000,000		604,793,000
JUMLAH:			7,154,997,000	1,349,000,000	-	8,503,997,000
X	BANGKA BELITUNG					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka	1,278,530,000	220,000,000		1,498,530,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Belitung	952,468,000	166,000,000		1,118,468,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Barat	829,645,000	148,000,000		977,645,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Tengah	828,592,000	148,000,000		976,592,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Selatan	1,093,229,000	166,000,000		1,259,229,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Belitung Timur	622,008,000	112,000,000		734,008,000
7	Dinas Kesehatan	Kota Pangkal Pinang	721,702,000	166,000,000		887,702,000
JUMLAH:			6,326,174,000	1,126,000,000	-	7,452,174,000
XI	DKI JAKARTA					
1	Dinas Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	8,500,000,000	637,000,000		9,137,000,000
JUMLAH:			8,500,000,000	637,000,000	-	9,137,000,000
XII	JAWA BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bogor	15,279,660,000	1,415,000,000		16,694,660,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sukabumi	10,668,295,000	813,000,000		11,481,295,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Cianjur	5,658,451,000	631,000,000		6,289,451,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bandung	8,431,665,000	869,000,000		9,300,665,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Garut	11,355,905,000	911,000,000		12,266,905,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tasikmalaya	4,847,267,000	561,000,000		5,408,267,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ciamis	4,535,655,000	519,000,000		5,054,655,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kuningan	4,142,911,000	519,000,000		4,661,911,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Cirebon	7,153,799,000	799,000,000		7,952,799,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Majalengka	3,487,213,000	449,000,000		3,936,213,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumedang	3,726,626,000	449,000,000		4,175,626,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Indramayu	5,991,326,000	687,000,000		6,678,326,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Subang	4,898,899,000	561,000,000		5,459,899,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Purwakarta	2,009,823,000	281,000,000		2,290,823,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karawang	6,039,659,000	701,000,000		6,740,659,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bekasi	4,664,013,000	547,000,000		5,211,013,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bandung Barat	3,583,363,000	435,000,000		4,018,363,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pangandaran	1,838,779,000	211,000,000		2,049,779,000
19	Dinas Kesehatan	Kota Bogor	1,927,398,000	337,000,000		2,264,398,000
20	Dinas Kesehatan	Kota Sukabumi	1,138,924,000	211,000,000		1,349,924,000
21	Dinas Kesehatan	Kota Bandung	6,277,841,000	1,023,000,000		7,300,841,000
22	Dinas Kesehatan	Kota Cirebon	1,685,172,000	309,000,000		1,994,172,000
23	Dinas Kesehatan	Kota Bekasi	2,596,974,000	435,000,000		3,031,974,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
24	Dinas Kesehatan	Kota Depok	2,566,655,000	449,000,000		3,015,655,000
25	Dinas Kesehatan	Kota Cimahi	972,323,000	183,000,000		1,155,323,000
26	Dinas Kesehatan	Kota Tasikmalaya	1,558,041,000	281,000,000		1,839,041,000
27	Dinas Kesehatan	Kota Banjar	738,166,000	141,000,000		879,166,000
JUMLAH:			127,774,803,000	14,727,000,000	-	142,501,803,000
XIII	JAWA TENGAH					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Cilacap	4,510,612,000	536,000,000		5,046,612,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banyumas	4,597,543,000	550,000,000		5,147,543,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Purbalingga	2,250,507,000	312,000,000		2,562,507,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banjarnegara	3,871,599,000	494,000,000		4,365,599,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kebumen	4,067,663,000	494,000,000		4,561,663,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Purworejo	2,901,732,000	382,000,000		3,283,732,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Wonosobo	2,430,737,000	340,000,000		2,770,737,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Magelang	3,269,316,000	410,000,000		3,679,316,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Boyolali	3,126,488,000	410,000,000		3,536,488,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Klaten	3,919,914,000	480,000,000		4,399,914,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sukoharjo	1,261,386,000	172,000,000		1,433,386,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Wonogiri	3,790,382,000	480,000,000		4,270,382,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	2,232,954,000	298,000,000		2,530,954,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sragen	2,787,985,000	354,000,000		3,141,985,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Grobogan	3,302,723,000	424,000,000		3,726,723,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Blora	2,721,925,000	368,000,000		3,089,925,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rembang	1,642,948,000	228,000,000		1,870,948,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pati	3,206,442,000	410,000,000		3,616,442,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kudus	1,848,376,000	270,000,000		2,118,376,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jepara	2,128,737,000	298,000,000		2,426,737,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Demak	2,773,829,000	382,000,000		3,155,829,000
22	Dinas Kesehatan	Kabupaten Semarang	2,739,520,000	368,000,000		3,107,520,000
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung	2,483,672,000	340,000,000		2,823,672,000
24	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kendal	3,216,627,000	424,000,000		3,640,627,000
25	Dinas Kesehatan	Kabupaten Batang	2,130,579,000	298,000,000		2,428,579,000
26	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pekalongan	2,710,195,000	368,000,000		3,078,195,000
27	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pemasang	2,244,442,000	312,000,000		2,556,442,000
28	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tegal	3,069,429,000	410,000,000	1,200,000,000	4,679,429,000
29	Dinas Kesehatan	Kabupaten Brebes	4,238,214,000	536,000,000		4,774,214,000
30	Dinas Kesehatan	Kota Magelang	368,644,000	90,000,000		458,644,000
31	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta	1,301,326,000	242,000,000		1,543,326,000
32	Dinas Kesehatan	Kota Salatiga	445,493,000	100,000,000		545,493,000
33	Dinas Kesehatan	Kota Semarang	3,059,042,000	522,000,000		3,581,042,000
34	Dinas Kesehatan	Kota Pekalongan	1,052,118,000	200,000,000		1,252,118,000
35	Dinas Kesehatan	Kota Tegal	596,598,000	116,000,000		712,598,000
JUMLAH:			92,299,697,000	12,418,000,000	1,200,000,000	105,917,697,000
XIV	DI YOGYAKARTA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kulon Progo	2,037,942,000	298,000,000		2,335,942,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bantul	2,728,488,000	382,000,000		3,110,488,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gunung Kidul	3,103,087,000	424,000,000		3,527,087,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sleman	2,629,141,000	354,000,000		2,983,141,000
5	Dinas Kesehatan	Kota Yogyakarta	1,380,131,000	256,000,000		1,636,131,000
JUMLAH:			11,878,789,000	1,714,000,000	-	13,592,789,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XV	JAWA TIMUR					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pacitan	2,345,619,000	341,000,000		2,686,619,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ponorogo	3,224,394,000	439,000,000		3,663,394,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Trenggalek	2,202,810,000	313,000,000		2,515,810,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tulungagung	3,274,898,000	439,000,000		3,713,898,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Blitar	2,471,641,000	341,000,000		2,812,641,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kediri	4,028,844,000	523,000,000		4,551,844,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Malang	4,792,555,000	551,000,000		5,343,555,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lumajang	2,616,609,000	355,000,000		2,971,609,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jember	6,085,893,000	691,000,000		6,776,893,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banyuwangi	5,199,964,000	635,000,000		5,834,964,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bondowoso	3,101,131,000	355,000,000		3,456,131,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Situbondo	1,980,622,000	243,000,000		2,223,622,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Probolinggo	3,477,910,000	467,000,000		3,944,910,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pasuruan	3,714,880,000	467,000,000		4,181,880,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sidoarjo	2,855,517,000	369,000,000		3,224,517,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mojokerto	2,840,826,000	383,000,000		3,223,826,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jombang	3,748,199,000	481,000,000		4,229,199,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nganjuk	2,120,858,000	285,000,000		2,405,858,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Madiun	2,576,603,000	369,000,000		2,945,603,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Magetan	2,193,161,000	313,000,000		2,506,161,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ngawi	2,517,960,000	341,000,000		2,858,960,000
22	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bojonegoro	3,890,631,000	509,000,000		4,399,631,000
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tuban	3,392,717,000	467,000,000		3,859,717,000
24	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lamongan	3,810,825,000	467,000,000		4,277,825,000
25	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gresik	3,466,761,000	453,000,000		3,919,761,000
26	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangkalan	2,781,517,000	313,000,000		3,094,517,000
27	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sampang	2,610,477,000	299,000,000		2,909,477,000
28	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pamekasan	2,347,438,000	285,000,000		2,632,438,000
29	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumenep	3,292,572,000	425,000,000		3,717,572,000
30	Dinas Kesehatan	Kota Kediri	688,035,000	131,000,000		819,035,000
31	Dinas Kesehatan	Kota Blitar	222,765,000	75,000,000		297,765,000
32	Dinas Kesehatan	Kota Malang	1,153,492,000	215,000,000		1,368,492,000
33	Dinas Kesehatan	Kota Probolinggo	446,396,000	100,000,000		546,396,000
34	Dinas Kesehatan	Kota Pasuruan	594,693,000	117,000,000		711,693,000
35	Dinas Kesehatan	Kota Mojokerto	369,365,000	90,000,000		459,365,000
36	Dinas Kesehatan	Kota Madiun	451,246,000	100,000,000		551,246,000
37	Dinas Kesehatan	Kota Surabaya	5,573,120,000	873,000,000		6,446,120,000
38	Dinas Kesehatan	Kota Batu	368,989,000	90,000,000		458,989,000
JUMLAH:			102,831,933,000	13,710,000,000	-	116,541,933,000
XVI	BANTEN					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pandeglang	5,048,296,000	506,000,000		5,554,296,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lebak	5,661,853,000	562,000,000		6,223,853,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tangerang	5,174,168,000	604,000,000		5,778,168,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Serang	3,403,101,000	436,000,000		3,839,101,000
5	Dinas Kesehatan	Kota Tangerang	2,585,303,000	450,000,000		3,035,303,000
6	Dinas Kesehatan	Kota Cilegon	614,694,000	114,000,000		728,694,000
7	Dinas Kesehatan	Kota Serang	1,240,117,000	226,000,000		1,466,117,000
8	Dinas Kesehatan	Kota Tangerang Selatan	1,500,000,000	352,000,000		1,852,000,000
JUMLAH:			25,227,532,000	3,250,000,000	-	28,477,532,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XVII	BALI					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jembrana	958,887,000	165,000,000		1,123,887,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tabanan	2,174,996,000	325,000,000		2,499,996,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Badung	780,000,000	213,000,000		993,000,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gianyar	1,444,294,000	213,000,000		1,657,294,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Klungkung	871,317,000	149,000,000		1,020,317,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangli	1,173,787,000	197,000,000		1,370,787,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karang Asem	1,236,008,000	197,000,000		1,433,008,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buleleng	2,183,769,000	325,000,000		2,508,769,000
9	Dinas Kesehatan	Kota Denpasar	660,000,000	181,000,000		841,000,000
	JUMLAH:		11,483,058,000	1,965,000,000	-	13,448,058,000
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lombok Barat	2,676,482,000	414,000,000		3,090,482,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lombok Tengah	4,836,552,000	606,000,000		5,442,552,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lombok Timur	5,535,988,000	702,000,000		6,237,988,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumbawa	4,149,010,000	606,000,000		4,755,010,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Dompu	1,273,071,000	222,000,000		1,495,071,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bima	3,145,513,000	486,000,000		3,631,513,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumbawa Barat	1,382,617,000	222,000,000		1,604,617,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lombok Utara	1,128,986,000	198,000,000		1,326,986,000
9	Dinas Kesehatan	Kota Mataram	967,825,000	270,000,000		1,237,825,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Bima	427,474,000	126,000,000		553,474,000
	JUMLAH:		25,523,518,000	3,852,000,000	-	29,375,518,000
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumba Barat	1,141,425,000	190,000,000		1,331,425,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumba Timur	4,180,794,000	580,000,000		4,760,794,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kupang	5,035,023,000	684,000,000		5,719,023,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	5,801,183,000	788,000,000		6,589,183,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Timor Tengah Utara	4,956,823,000	684,000,000		5,640,823,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Belu	3,785,065,000	450,000,000		4,235,065,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Alor	4,428,904,000	632,000,000		5,060,904,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lembata	1,568,634,000	242,000,000		1,810,634,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Flores Timur	3,843,958,000	528,000,000		4,371,958,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sikka	4,896,144,000	606,000,000		5,502,144,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ende	4,576,657,000	632,000,000		5,208,657,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ngada	2,454,572,000	372,000,000		2,826,572,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Manggarai	3,948,321,000	554,000,000		4,502,321,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rote Ndao	2,092,076,000	320,000,000		2,412,076,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Manggarai Barat	2,717,310,000	398,000,000		3,115,310,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumba Tengah	1,332,307,000	216,000,000		1,548,307,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sumba Barat Daya	1,615,099,000	268,000,000		1,883,099,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nagekeo	1,269,722,000	190,000,000		1,459,722,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Manggarai Timur	3,956,439,000	580,000,000		4,536,439,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sabu Raijua	1,082,130,000	164,000,000		1,246,130,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Malaka	3,785,065,000	450,000,000		4,235,065,000
22	Dinas Kesehatan	Kota Kupang	1,002,593,000	268,000,000		1,270,593,000
	JUMLAH:		69,470,244,000	9,796,000,000	-	79,266,244,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XX	KALIMANTAN BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sambas	4,863,242,000	599,000,000		5,462,242,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkayang	2,934,773,000	379,000,000		3,313,773,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Landak	2,941,474,000	357,000,000		3,298,474,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pontianak	1,822,954,000	313,000,000		2,135,954,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sanggau	3,291,648,000	401,000,000		3,692,648,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ketapang	4,516,766,000	533,000,000		5,049,766,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sintang	3,516,964,000	445,000,000		3,961,964,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kapuas Hulu	4,207,940,000	511,000,000		4,718,940,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sekadau	1,883,304,000	269,000,000		2,152,304,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Melawi	1,770,095,000	247,000,000		2,017,095,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kayong Utara	1,239,294,000	181,000,000		1,420,294,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kubu Raya	2,599,145,000	445,000,000		3,044,145,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Pontianak	2,226,339,000	511,000,000		2,737,339,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Singkawang	460,794,000	115,000,000		575,794,000
	JUMLAH:		38,274,732,000	5,306,000,000	-	43,580,732,000
XXI	KALIMANTAN TENGAH					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kotawaringin Barat	2,169,998,000	357,000,000		2,526,998,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,669,638,000	445,000,000		3,114,638,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kapuas	3,423,609,000	577,000,000		4,000,609,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Barito Selatan	1,559,825,000	269,000,000		1,828,825,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Barito Utara	2,131,199,000	357,000,000		2,488,199,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sukamara	609,464,000	115,000,000		724,464,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lamandau	1,336,789,000	247,000,000		1,583,789,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Seruyan	720,000,000	269,000,000		989,000,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Katingan	2,078,414,000	357,000,000		2,435,414,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pulang Pisau	1,381,453,000	247,000,000		1,628,453,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gunung Mas	1,888,453,000	335,000,000		2,223,453,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Barito Timur	1,432,941,000	247,000,000		1,679,941,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Murung Raya	1,929,540,000	313,000,000		2,242,540,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Palangka Raya	965,717,000	225,000,000		1,190,717,000
	JUMLAH:		24,297,040,000	4,360,000,000	-	28,657,040,000
XXII	KALIMANTAN SELATAN					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanah Laut	1,080,000,000	401,000,000		1,481,000,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kota Baru	3,518,743,000	599,000,000		4,117,743,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banjar	3,106,402,000	511,000,000		3,617,402,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Barito Kuala	3,159,498,000	423,000,000		3,582,498,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin	780,000,000	291,000,000		1,071,000,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,732,063,000	467,000,000		3,199,063,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,408,113,000	423,000,000		2,831,113,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2,106,777,000	291,000,000		2,397,777,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tabalong	2,054,954,000	357,000,000		2,411,954,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanah Bumbu	1,794,137,000	313,000,000		2,107,137,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Balangan	1,347,335,000	247,000,000		1,594,335,000
12	Dinas Kesehatan	Kota Banjarmasin	2,580,513,000	577,000,000		3,157,513,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Banjar Baru	746,520,000	181,000,000		927,520,000
	JUMLAH:		27,415,055,000	5,081,000,000	-	32,496,055,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XXIII	KALIMANTAN TIMUR					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Paser	1,020,000,000	381,000,000		1,401,000,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kutai Barat	3,190,391,000	403,000,000		3,593,391,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1,800,000,000	667,000,000		2,467,000,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kutai Timur	1,140,000,000	425,000,000		1,565,000,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Berau	1,020,000,000	381,000,000		1,401,000,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	660,000,000	249,000,000		909,000,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mahakam Hulu	886,219,000	117,000,000		1,003,219,000
8	Dinas Kesehatan	Kota Balikpapan	1,620,000,000	601,000,000		2,221,000,000
9	Dinas Kesehatan	Kota Samarinda	1,440,000,000	535,000,000		1,975,000,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Bontang	360,000,000	139,000,000		499,000,000
	JUMLAH:		13,136,610,000	3,898,000,000	-	17,034,610,000
XXIV	KALIMANTAN UTARA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Malinau	780,000,000	294,000,000		1,074,000,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bulungan	720,000,000	272,000,000		992,000,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nunukan	720,000,000	272,000,000		992,000,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanah Tidung	240,000,000	100,000,000		340,000,000
5	Dinas Kesehatan	Kota Tarakan	420,000,000	162,000,000		582,000,000
	JUMLAH:		2,880,000,000	1,100,000,000	-	3,980,000,000
XXV	SULAWESI UTARA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	1,849,477,000	328,000,000		2,177,477,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Minahasa	2,486,390,000	428,000,000		2,914,390,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2,477,085,000	328,000,000		2,805,085,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,125,640,000	428,000,000		3,553,640,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Minahasa Selatan	2,042,618,000	348,000,000		2,390,618,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Minahasa Utara	1,358,914,000	228,000,000		1,586,914,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1,258,282,000	228,000,000		1,486,282,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	1,975,486,000	268,000,000		2,243,486,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Minahasa Tenggara	1,437,036,000	248,000,000		1,685,036,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	769,670,000	148,000,000		917,670,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	538,235,000	108,000,000		646,235,000
12	Dinas Kesehatan	Kota Manado	1,485,545,000	328,000,000		1,813,545,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Bitung	814,753,000	188,000,000		1,002,753,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Tomohon	619,573,000	148,000,000		767,573,000
15	Dinas Kesehatan	Kota Kotamobagu	434,218,000	108,000,000		542,218,000
	JUMLAH:		22,672,922,000	3,860,000,000	-	26,532,922,000
XXVI	SULAWESI TENGAH					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banggai Kepulauan	1,445,164,000	207,000,000		1,652,164,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banggai	3,906,015,000	487,000,000		4,393,015,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Morowali	1,444,792,000	187,000,000		1,631,792,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Poso	3,335,652,000	427,000,000		3,762,652,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Donggala	2,312,680,000	307,000,000		2,619,680,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Toli-Toli	2,079,549,000	287,000,000		2,366,549,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buol	1,680,663,000	227,000,000		1,907,663,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Parigi Moutong	3,297,755,000	427,000,000		3,724,755,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tojo Una-Una	1,844,989,000	267,000,000		2,111,989,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sigi	2,927,251,000	387,000,000		3,314,251,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banggai Laut	722,582,000	107,000,000		829,582,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Morowali Utara	1,605,324,000	207,000,000		1,812,324,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Palu	1,104,985,000	247,000,000		1,351,985,000
	JUMLAH:		27,707,401,000	3,771,000,000	-	31,478,401,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XXVII	SULAWESI SELATAN					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,260,086,000	286,000,000		2,546,086,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bulukumba	2,564,848,000	386,000,000		2,950,848,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bantaeng	1,480,218,000	266,000,000		1,746,218,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jeneponto	2,880,786,000	366,000,000		3,246,786,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Takalar	1,938,033,000	306,000,000		2,244,033,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gowa	3,384,826,000	506,000,000		3,890,826,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sinjai	2,054,402,000	326,000,000		2,380,402,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maros	1,810,936,000	286,000,000		2,096,936,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	3,789,094,000	466,000,000		4,255,094,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Barru	1,476,136,000	246,000,000		1,722,136,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bone	5,518,292,000	766,000,000		6,284,292,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Soppeng	2,136,784,000	346,000,000		2,482,784,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Wajo	2,956,086,000	466,000,000		3,422,086,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	1,780,759,000	286,000,000		2,066,759,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pinrang	1,992,547,000	306,000,000		2,298,547,000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Enrekang	1,603,057,000	266,000,000		1,869,057,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Luwu	2,956,419,000	426,000,000		3,382,419,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tana Toraja	2,531,656,000	426,000,000		2,957,656,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Luwu Utara	1,693,639,000	266,000,000		1,959,639,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Luwu Timur	2,003,826,000	306,000,000		2,309,826,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Toraja Utara	3,945,637,000	506,000,000		4,451,637,000
22	Dinas Kesehatan	Kota Makassar	4,554,995,000	866,000,000		5,420,995,000
23	Dinas Kesehatan	Kota Pare-Pare	532,266,000	126,000,000		658,266,000
24	Dinas Kesehatan	Kota Palopo	1,007,803,000	226,000,000		1,233,803,000
	JUMLAH:		58,853,131,000	9,024,000,000	-	67,877,131,000
XXVIII	SULAWESI TENGGARA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buton	5,545,706,000	667,000,000		6,212,706,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Muna	7,078,699,000	847,000,000		7,925,699,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Konawe	4,050,384,000	487,000,000		4,537,384,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kolaka	1,611,783,000	247,000,000		1,858,783,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Konawe Selatan	4,019,108,000	467,000,000		4,486,108,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bombana	3,305,910,000	447,000,000		3,752,910,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Wakatobi	3,094,100,000	407,000,000		3,501,100,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kolaka Utara	2,567,316,000	327,000,000		2,894,316,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buton Utara	1,455,691,000	207,000,000		1,662,691,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Konawe Utara	840,000,000	287,000,000		1,127,000,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kolaka Timur	1,746,099,000	267,000,000		2,013,099,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Konawe Kepulauan	1,181,362,000	147,000,000		1,328,362,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Kendari	1,394,579,000	307,000,000		1,701,579,000
14	Dinas Kesehatan	Kota Bau-Bau	1,490,617,000	347,000,000		1,837,617,000
	JUMLAH:		39,381,354,000	5,458,000,000	-	44,839,354,000
XXIX	GORONTALO					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Boalemo	1,544,602,000	227,000,000		1,771,602,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gorontalo	2,621,135,000	427,000,000		3,048,135,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pohuwato	2,196,767,000	327,000,000		2,523,767,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bone Bolango	2,325,883,000	407,000,000		2,732,883,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gorontalo Utara	2,155,339,000	307,000,000		2,462,339,000
6	Dinas Kesehatan	Kota Gorontalo	874,954,000	207,000,000		1,081,954,000
	JUMLAH:		11,718,680,000	1,902,000,000	-	13,620,680,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
XXX	SULAWESI BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Majene	1,671,979,000	227,000,000		1,898,979,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Polewali Mandar	3,470,815,000	407,000,000		3,877,815,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamasa	2,702,207,000	347,000,000		3,049,207,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamuju	3,881,584,000	447,000,000		4,328,584,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamuju Utara	2,028,493,000	287,000,000		2,315,493,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamuju Tengah	1,764,356,000	207,000,000		1,971,356,000
JUMLAH:			15,519,434,000	1,922,000,000	-	17,441,434,000
XXXI	MALUKU					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2,216,807,000	375,000,000		2,591,807,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maluku Tenggara	2,114,312,000	431,000,000		2,545,312,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maluku Tengah	7,043,203,000	935,000,000		7,978,203,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buru	1,655,678,000	263,000,000		1,918,678,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Aru	4,222,838,000	683,000,000		4,905,838,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Seram Bagian Barat	3,316,338,000	487,000,000		3,803,338,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Seram Bagian Timur	3,315,579,000	543,000,000		3,858,579,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maluku Barat Daya	3,811,625,000	571,000,000		4,382,625,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Buru Selatan	1,907,328,000	347,000,000		2,254,328,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Ambon	2,310,198,000	627,000,000		2,937,198,000
11	Dinas Kesehatan	Kota Tual	1,279,320,000	375,000,000		1,654,320,000
JUMLAH:			33,193,226,000	5,637,000,000	-	38,830,226,000
XXXII	MALUKU UTARA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Barat	2,170,886,000	319,000,000		2,489,886,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Tengah	1,980,390,000	319,000,000		2,299,390,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Sula	1,680,939,000	291,000,000		1,971,939,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Selatan	6,021,404,000	851,000,000		6,872,404,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Utara	3,123,878,000	487,000,000		3,610,878,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Timur	2,603,002,000	403,000,000		3,006,002,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pulau Morotai	1,043,613,000	179,000,000		1,222,613,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pulau Taliabu	1,176,657,000	207,000,000		1,383,657,000
9	Dinas Kesehatan	Kota Ternate	1,038,372,000	291,000,000		1,329,372,000
10	Dinas Kesehatan	Kota Tidore Kepulauan	600,000,000	291,000,000		891,000,000
JUMLAH:			21,439,141,000	3,638,000,000	-	25,077,141,000
XXXIII	PAPUA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Merauke	4,028,743,000	613,000,000		4,641,743,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jayawijaya	2,623,815,000	403,000,000		3,026,815,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jayapura	3,032,258,000	583,000,000		3,615,258,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nabire	4,927,987,000	793,000,000		5,720,987,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Yapen	2,492,585,000	403,000,000		2,895,585,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Biak Numfor	3,626,884,000	553,000,000		4,179,884,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Paniai	3,354,838,000	553,000,000		3,907,838,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Puncak Jaya	1,600,669,000	253,000,000		1,853,669,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mimika	2,534,373,000	403,000,000		2,937,373,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Boven Digoel	3,346,371,000	613,000,000		3,959,371,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mappi	2,209,605,000	343,000,000		2,552,605,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Asmat	2,653,873,000	403,000,000		3,056,873,000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Yahukimo	6,407,138,000	943,000,000		7,350,138,000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pegunungan Bintang	5,617,623,000	883,000,000		6,500,623,000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tolikara	4,742,678,000	763,000,000		5,505,678,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	SATUAN KERJA		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)		KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER	JUMLAH
			ALOKASI PUSKESMAS	ALOKASI MANAJEMEN DI KAB/KOTA		
1	2		3		4	6
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sarmi	540,000,000	283,000,000		823,000,000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Keerom	1,870,002,000	313,000,000		2,183,002,000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Waropen	1,823,758,000	313,000,000		2,136,758,000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Supiori	951,919,000	163,000,000		1,114,919,000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamberamo Raya	1,131,359,000	223,000,000		1,354,359,000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Nduga	1,343,511,000	253,000,000		1,596,511,000
22	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lanny Jaya	1,800,073,000	313,000,000		2,113,073,000
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mamberamo Tengah	1,169,601,000	163,000,000		1,332,601,000
24	Dinas Kesehatan	Kabupaten Yalimo	1,327,555,000	223,000,000		1,550,555,000
25	Dinas Kesehatan	Kabupaten Puncak	1,376,445,000	253,000,000		1,629,445,000
26	Dinas Kesehatan	Kabupaten Dogiyai	1,736,911,000	313,000,000		2,049,911,000
27	Dinas Kesehatan	Kabupaten Intan Jaya	1,015,754,000	193,000,000		1,208,754,000
28	Dinas Kesehatan	Kabupaten Deiyai	1,759,469,000	313,000,000		2,072,469,000
29	Dinas Kesehatan	Kota Jayapura	1,247,400,000	373,000,000		1,620,400,000
JUMLAH:			72,293,197,000	12,197,000,000	-	84,490,197,000
XXXIV	PAPUA BARAT					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Fakfak	1,499,678,000	315,000,000		1,814,678,000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kaimana	480,000,000	255,000,000		735,000,000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Teluk Wondama	1,179,523,000	195,000,000		1,374,523,000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Teluk Bintuni	3,877,606,000	615,000,000		4,492,606,000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Manokwari	2,132,710,000	435,000,000		2,567,710,000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sorong Selatan	2,635,820,000	465,000,000		3,100,820,000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sorong	3,128,192,000	525,000,000		3,653,192,000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Raja Ampat	3,653,724,000	585,000,000		4,238,724,000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tambrauw	804,448,000	165,000,000		969,448,000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Maybrat	2,418,254,000	435,000,000		2,853,254,000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Manokwari Selatan	609,345,000	135,000,000		744,345,000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pegunungan Arfak	1,371,028,000	285,000,000		1,656,028,000
13	Dinas Kesehatan	Kota Sorong	614,564,000	195,000,000		809,564,000
JUMLAH:			24,404,892,000	4,605,000,000	-	29,009,892,000
JUMLAH I S/D XXXIII (SELURUH INDONESIA)			1,199,999,771,000	179,268,000,000	1,200,000,000	1,380,467,771,000

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK